



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RENSTRA  
(RENCANA STRATEGIS)  
TAHUN 2024-2026**

TAHUN  
**2023**

**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.



## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
  - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
  - BAB VII. serta Pendanaan;
  - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| DAFTAR ISI .....  | i   |
| DAFTAR GAMBAR .....   | ii  |
| DAFTAR TABEL.....   | iii |
| <br>  |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....  | 1   |
| 1.2 LANDASAN HUKUM .....  | 6   |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....  | 9   |
| <br>  |     |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN<br>UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....                            | 12  |
| 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....  | 12  |
| 2.2 SUMBER DAYA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM<br>PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....                                      | 20  |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN DISPERINDAGKOP DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN<br>TIMUR .....   | 23  |
| <br>  |     |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....   | 45  |
| 3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....  | 45  |
| 3.2 ISU STRATEGIS .....   | 46  |
| <br>  |     |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....  | 51  |
| 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH .....   | 51  |
| <br>  |     |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....   | 65  |
| <br>  |     |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....  | 70  |
| 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....   | 70  |
| 6.2 PENDANAAN INDIKATIF.....  | 74  |
| <br>  |     |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDUSTRI, PERDAGANGAN,<br>KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..... | 102 |
| <br>  |     |
| BAB VIII PENUTUP.....   | 105 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra.....                        | 4  |
| Gambar 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penggaraan..... | 5  |
| Gambar 3 Struktur Organisasi .....                             | 18 |
| Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD .....                        | 19 |
| Gambar 5 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.....            | 65 |

## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 1. Keadaan Pegawai Negeri dan Non PNS yang bertugas.....   | 20  |
| Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri yang bertugas berdasarkan tingkat pendidikan formal .....  | 20  |
| Tabel 3. Kondisi Sarana Kerja Tahun 2020.....  | 21  |
| Tabel 4. Sarana Prasarana Tahun 2020.....  | 21  |
| Tabel 5 Komposisi anggaran.....  | 23  |
| Tabel 6. Perubahan Tujuan Renstra Tahun 2019-2023 .....  | 24  |
| Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha<br>Kecil dan Menengah Tahun 2013 - 2018 .....                                 | 26  |
| Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha<br>Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022.....      | 28  |
| Tabel 9. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan tahun 2019 s.d 2023 Pelayanan Dinas<br>Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha .....                                    | 34  |
| Tabel 10. Realisasi APBN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan<br>Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 .....                      | 39  |
| Tabel 11. Kinerja Pelayanan Pendapatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha<br>Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022.....     | 40  |
| Tabel 12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan<br>Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 s/d 2018 .....                | 41  |
| Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan<br>Koperasi dan UKM 2014 s/d 2018 .....  | 43  |
| Tabel 14 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah.....  | 45  |
| Tabel 15 Isu Strategis.....  | 47  |
| Tabel 16. Keterkaitan Sasaran RPD 2024-2026 Prov Kaltim dengan Tujuan Renstra 2024-<br>2026 Disperindagkop .....   | 51  |
| Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan<br>Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kaltim tahun 2024 -2026.....  | 63  |
| Tabel 18 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian<br>Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026..... | 66  |
| Tabel 19 Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Indikatif Tahun 2024-2026 .....  | 75  |
| Tabel 20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada<br>Tujuan dan Sasaran RPJMD .....  | 102 |
| Tabel 21 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm Yang<br>Mengacu Pada Indikator Kinerja Daerah (Ikd)Rpd Tahun 2024 – 2026 .....   | 104 |
| Tabel 22. Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran.....  | 106 |
| Tabel 23. Formula Perhitungan Program indikator .....  | 108 |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

### 1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) ini disusun berdasarkan aturan terbaru yakni Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dengan berlakunya aturan tersebut maka terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang berdampak pada adanya perubahan di beberapa tugas dan fungsi bidang maupun seksi, sehingga berdampak pada perubahan beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dan memenuhi serta mendukung baik capaian Program, Sasaran maupun Tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya perubahan Renstra ini maka diharapkan terjadi keselarasan antara, Renstra PD dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dapat mendukung tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPD. Dalam proses penyusunan perubahan Renstra sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bab I Pasal 1 yang berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun”, perencanaan di Daerah ada dua yakni Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, khusus Rencana Perangkat Daerah sebagaimana pasal 11 ayat (3) disebutkan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : (a)



Renstra Perangkat daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah. Dalam Pasal pasal 13 ayat (1) “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas atau fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Perubahan Renstra PD mengikuti alur sesuai dengan urutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah ( RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur serta pagu yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ini menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD setiap tahunnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Strategi menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sektor Perindustrian dan Sektor Perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD (Renja PD) setiap tahunnya.

### 1.1.2 Proses Penyusunan Renstra PD

Sehubungan dengan adanya Perubahan Aturan perundang-undangan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dengan maksud tidak mengurangi perjalanan perencanaan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maka Review Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 359 disebutkan "Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan Rencana Pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : terdiri atas (a) Renstra Perangkat Daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah, sedangkan dalam pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunan Review Renstra ini juga memperhatikan pada pasal 16 ayat (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

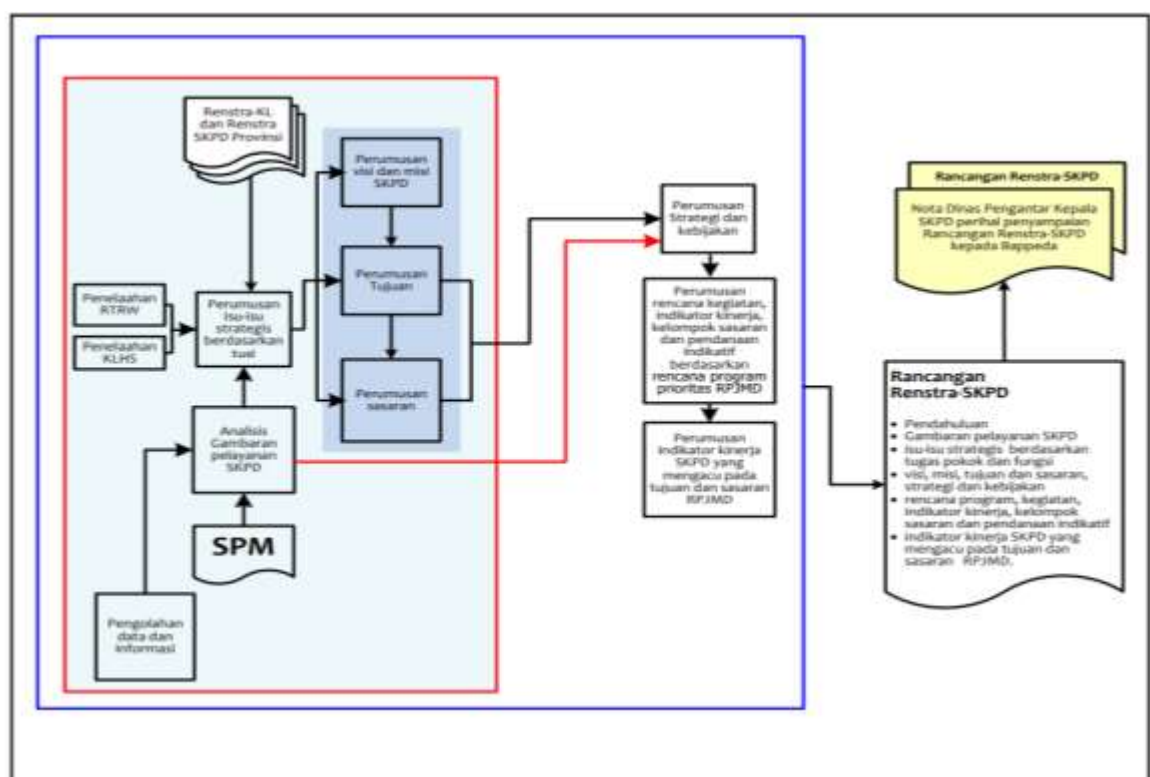
Dalam penyusunan perubahan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada pasal 60 ayat (2) disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPD sebagaimana dimaksud pada pasal 57".

Dalam Proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup. Dibawah ini, diuraikan alur proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada gambar 1

Gambar 1  
Proses Penyusunan Renstra







Adapun keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen RKPD, dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Hal ini mengacu pada :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Kebijakan pemerintah yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
  - a. RPD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan
  - b. RPD provinsi; RPD kota, RTRW kota, RPD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPD kabupaten/kota;
  - c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu;
4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

## **1.2 Landasan Hukum**

### **1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD**

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- c) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- g) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor no 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru

- h) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- i) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- j) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- k) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

#### 1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

Ketentuan tentang Perencanaan.

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun.



- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- f) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025;
- g) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/ 0378 /B.PPEPD-Bapp/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (Rpd) Provinsi Kalimantan Timur Dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

### **Ketentuan tentang Penganggaran**

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 5234);
- d) Undang – undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke 2 (dua) UU nomor. 23 tahun 2014.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan sebagai dasar Pemerintahan Transisi perencanaan tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk :

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
- b. Sebagai acuan Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengikuti perkembangan keadaan serta penyesuaian terhadap dengan kebijakan pusat maupun daerah terkait Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Menjaga konsistensi perencanaan penetapan program serta prioritas kegiatan pembangunan dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

- e. Sebagai alat ukur pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan rencana strategi (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

#### **BAB II Gambaran Pelayanan PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur**

Bab II memuat paling sedikit Tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan dan Kelompok sasaran Layanan

#### **BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat pada Bab II dan Isu Strategis .

#### **BAB IV Tujuan dan Sasaran;**

Memuat Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi, norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta Cascading Kinerja PD mulai Tujuan, Sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

#### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

#### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab VI memuat menguraikan program. Kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuktahirannya).



## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Industri , Perdagangan, Koperasi dan UKM.**

BAB VII memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 3 (tiga) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur dalam kaidah pelaksanaan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### ***2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah***

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional maka 17 PNS Esselon IV dalam struktural tugas menjadi Jabatan Fungsional sedangkan dasar hukum Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam perubahan pada Biro Organisasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### 2.1.1 Tugas pokok dan fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

### a. Kepala Dinas

#### a). Tugas Pokok.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai

#### b). Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### b. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan

pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### b.1 Sub Bagian Perencanaan Program Tugas Pokok

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### b.2 Subbagian Umum Tugas Pokok

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

#### b.3 Subbagian Keuangan

karena Penyetaraan jabatan Fungsional menjadi Analisis Perencanaan muda untuk tugas keuangan di akomodir langsung oleh Sekretaris Dinas Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur rencananya akan dibentuk menjadi 4 ( empat ) Bidang yaitu :

### **c. Bidang Industri**

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang industri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang industri mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Industri;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Industri;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan industri;



- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan usaha industri;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi industri; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

**d. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Perdagangan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan dalam negeri;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis perdagangan luar negeri; pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan luar negeri.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis kerjasama perdagangan; dan pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama perdagangan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya :

**Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar**

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan konsumen;

- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan barang beredar;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hubungan kelembagaan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang koperasi dan UKM.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM
- 2) Penyiapan bahan koodinasi perencanaan program di bidang koperasi dan UKM.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan koperasi dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

**f. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Untuk pembinaan pengembangan pelayanan teknis terhadap industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu :

**f.1 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Perencanaan program kegiatan pelaksanaan pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 4) Pemberian pelayanan teknis pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 5) Pelaksanaan pengembangan jasa pengujian, kalibrasi, jaminan mutu dan sertifikat mutu barang
- 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan,
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **f.2 UPTD Pelatihan Koperasi**

UPTD Pelatihan Koperasi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Pelatihan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

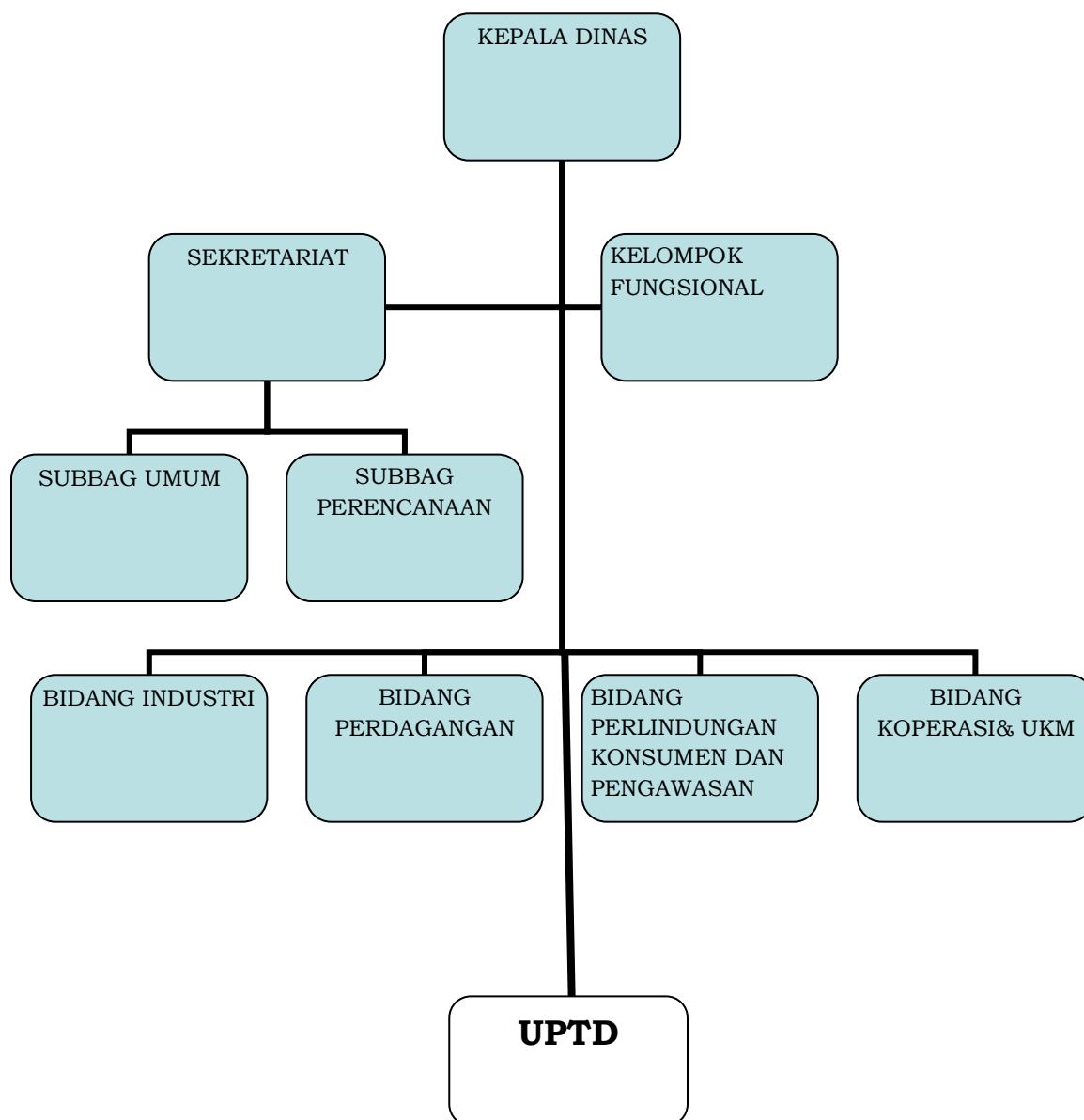
- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan koperasi.
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- 5) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi PD dan UPTD**

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

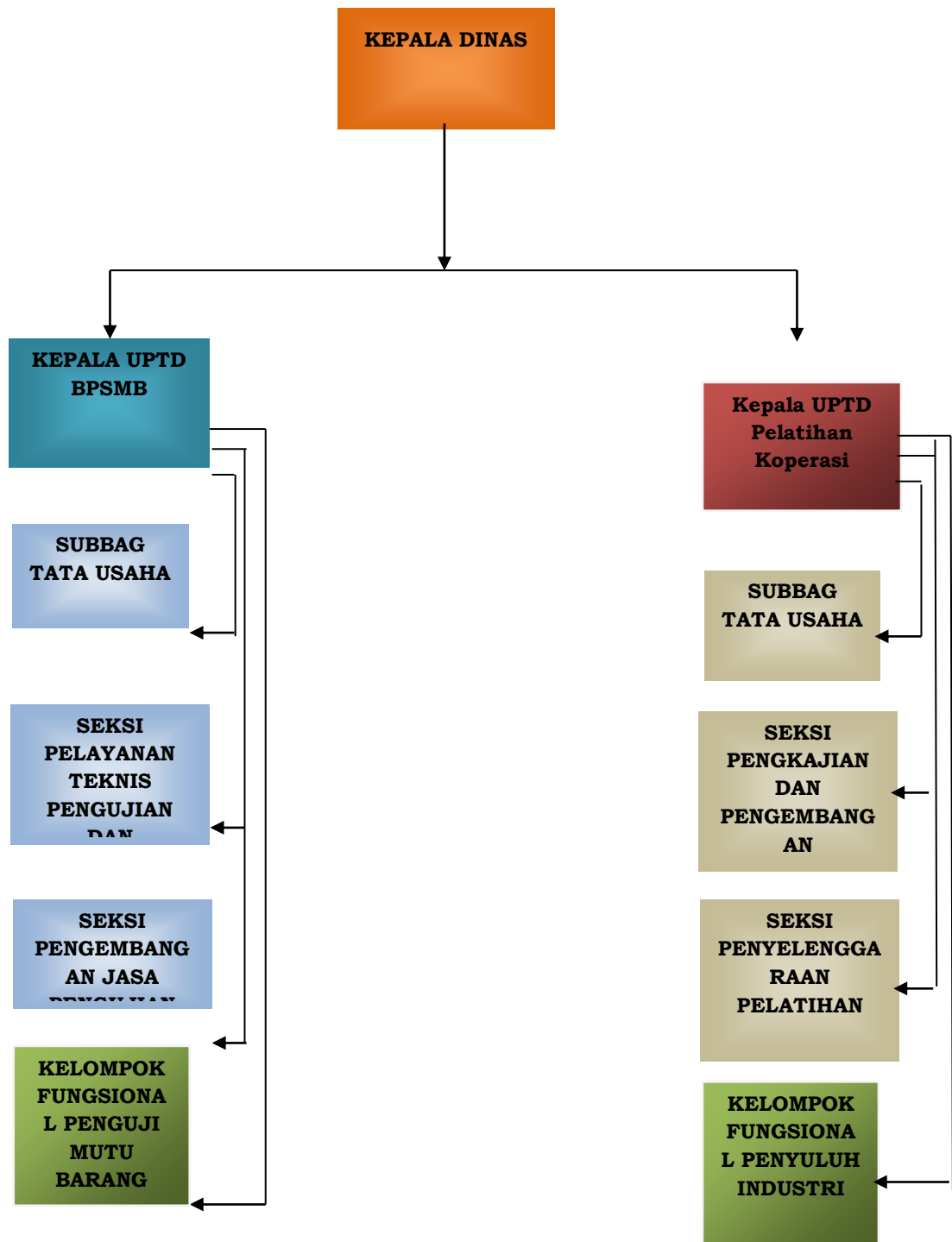
**Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas**

**Dasar** Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No.9 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 18





**Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2022 sebagai mana pada table dibawah ini :

Tabel 1. Keadaan Pegawai Negeri dan Non PNS yang bertugas

| No | Unit Kerja   | Jumlah PNS Golongan (orang) |           |           |   | Jumlah    |           | Jumlah Pegawai |
|----|--|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|
|    |  | IV                          | III       | II        | I | PNS       | NONPNS    |                |
| 1  | Kepala Dinas   | 1                           |           |           |   | 1         |           | 1              |
| 2  | Sekretariat  | 1                           | 9         | 4         |   | 14        | 34        | 38             |
| 3  | Bidang Industri  | 2                           | 6         |           |   | 10        | 8         | 18             |
| 4  | Bidang Perdagangan   | 1                           | 4         |           |   | 5         | 9         | 15             |
| 5  | Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen |                             | 8         | 1         |   | 9         | 7         | 16             |
| 6  | Bidang Koperasi & UKM                                      | 1                           | 4         |           |   | 5         | 8         | 13             |
| 7  | UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang               | 2                           | 12        | 2         |   | 17        | 24        | 37             |
| 8  | UPTD Pelatihan Koperasi                                    | 2                           | 2         | 3         |   | 7         | 24        | 25             |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>10</b>                   | <b>45</b> | <b>10</b> |   | <b>68</b> | <b>93</b> | <b>163</b>     |

Sumber: Subbag Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Per Desember 2022)

Berdasarkan tingkat pendidikan formal secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri yang bertugas di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

| NO | Tingkat Pendidikan Pegawai | Jumlah (orang) |
|----|----------------------------|----------------|
| 1  | SMP                        | 1              |
| 2  | SLTA                       | 17             |
| 3  | SARJANA MUDA / D-3         | 9              |
| 4  | STRATA-1                   | 33             |
| 5  | STRATA-2                   | 8              |
| 6  | STRATA-3                   | -              |
|    | <b>JUMLAH</b>              | <b>68</b>      |

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tertera pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut.

**Tabel 3. Kondisi Sarana Kerja Tahun 2020**

| NO           | SARANA KERJA          | JUMLAH   | Kondisi |       |                            | KETERANGAN            |
|--------------|-----------------------|----------|---------|-------|----------------------------|-----------------------|
|              |                       |          | Baik    | Rusak | Rencana penghapusan barang |                       |
| 1.           | Tanah bangunan kantor | 7 LS     |         |       |                            | Baik                  |
| 2.           | Rumah Dinas           | 3 buah   |         |       |                            | Baik                  |
| 3.           | Kendaraan Roda 4      | 27 Mobil |         |       |                            | Baik                  |
|              |                       | 1 Mobil  |         |       | 1                          | Rusak Ringan          |
|              |                       | 3 Mobil  |         |       | 1                          | Rusak Berat           |
| 4.           | Kendaraan Roda 2      | 37 Motor | 37      | 5     |                            |                       |
| 5.           | Komputer PC           | 68 buah  |         |       |                            |                       |
| 6.           | Laptop                | 63 buah  |         |       |                            |                       |
| 7.           | Mesin Tik             | 51 buah  | 48      | 3     |                            |                       |
| 8.           | Mesin Hitung          | 1 buah   |         |       |                            | Baik                  |
| 9.           | Telepon               | 4 unit   |         |       |                            | 1. (0541) 742482 PABX |
|              |                       |          |         |       |                            | 2. (0541) 747161      |
|              |                       |          |         |       |                            | 3. (0541) 206335      |
|              |                       |          |         |       |                            | 4. (0541) 736993      |
| 10.          | Faximile              | 1 unit   |         |       |                            | Baik: (0541) 742495   |
| 11.          | Mesin Foto Copy       | 1 unit   |         |       |                            | Kurang Baik           |
| 12.          | Camera                | 5 buah   |         |       |                            | 1 (Rusak Ringan)      |
| 13.          | Mesin Absen Digital   | 1 unit   |         |       |                            | Baik                  |
| <b>TOTAL</b> |                       |          | 85      | 8     | 2                          |                       |

Sumber data: *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020*

**Tabel 4. Sarana Prasarana Tahun 2020**

| NO  | URAIAN           | KEGIATAN     | VOLUME     | SUMBER DANA |
|-----|------------------|--------------|------------|-------------|
| (1) | (2)              | (3)          | (4)        | (5)         |
| 1.  | Gedung Kantor    | Pemeliharaan | 5 LS       | APBD        |
| 2.  | Mobilitas        | Pemeliharaan | 71 unit    | APBD/APBN   |
| 3.  | Peralatan Kantor | Pemeliharaan | 1.061 buah | APBD        |
| 4.  | Lain-lain        | Pemeliharaan | 406 buah   | APBD        |

Sumber data: *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Timur, akhir Desember 2020*

### 2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Komposisi anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari APBD dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 Komposisi Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 s/d 2022

Tabel 5 Komposisi anggaran

| No       | Sumber Dana                   | Tahun 2018            | Tahun 2019     | Tahun 2020     | Tahun 2021     | Tahun 2022     |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>APBD</b>                   |                       |                |                |                |                |
|          | Belanja Langsung              | <b>15.541.700.000</b> | 31.960.281.000 | 24.760.371.822 |                |                |
|          | Belanja Tidak Langsung        | 15.855.437.000        | 18.464.459.716 | 19.119.032.000 |                |                |
|          | Belanja Operasi               |                       |                |                | 51.432.079.126 | 89.539.902.623 |
|          | Belanja Modal                 |                       |                |                | 4.455.176.500  | 32.667.978.180 |
| <b>2</b> | <b>APBN</b>                   |                       |                |                |                |                |
|          | Kementerian Koperasi & UKM RI | 2.488.466.000         | 2.541.927.000  | 1.973.897.000  | 1.822.107.000  | 6.249.930.000  |
|          | Kementerian Perdagangan RI    | 1.776.815.000         | 1.944.824.000  | 915.515.000    | 1.083.015.000  | 980.181.000    |
|          | Kementerian Perindustrian RI  | 1.671.000.000         | 2.117.760.000  | 1.637.097.000  | 949.472.000    | 973.000.000    |

Sumber: Subbag Perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (per Desember 2022)

### **2.3 Kinerja Pelayanan DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur**

Kinerja Pelayanan OPD dalam hal ini Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dianalisis dari data series tahun 2018 – 2022. Analisa Kinerja ditelusuri dari pelaksanaan program dari setiap tahunnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 diukur dengan beberapa indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD indikator tersebut dari :

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas
4. Persentase penanganan pengaduan konsumen
5. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
6. Tertib Usaha
7. Persentase kinerja realisasi pupuk
8. Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan
9. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
10. Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi
11. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
12. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
13. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
14. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
15. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini



Berikut Indikator Kinerja utama tahun 2018 Rencana Strategis Tahun 2013 s.d 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB peningkatan jumlah produk unggulan daerah
2. Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Menurunnya jumlah barang yang tidak sesuai standar
3. Nilai Ekspor Non Migas
4. Disparitas harga Antar Wilayah
5. Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar per tahun
6. Jumlah Koperasi Unggulan.
7. Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM.
8. Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.
9. Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.
10. Penumbuhan Jumlah WUB
11. Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB
12. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM

Berikut Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Tahun 2019 s/d 2023 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mengalami terjadi perubahan pengukuran. Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan Perubahan RPJMD:

Tabel 6. Perubahan Tujuan Renstra Tahun 2019-2023

| <b>Sebelum Perubahan</b>   | <b>Sesudah Perubahan</b>  |
|--|---|
| Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah | Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara                      |
|  | Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara |
| Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM                            | Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM                               |

Berdasarkan tujuan tersebut maka Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Industri Pengolahan non migas dan non batubara.
2. Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim
3. Disparitas harga antar wilayah.
4. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)
5. Nilai Omset Koperasi, Nilai Omset UKM

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013 - 2018

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Tahun |        |      |      |          | Realisasi Capaian Tahun Ke |       |      |      |       | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |        |      |       |       |
|----|--|----------------------|--------|------|------|----------|----------------------------|-------|------|------|-------|-----------------------------|--------|------|-------|-------|
|    |  | 2014                 | 2015   | 2016 | 2017 | 2018     | 2014                       | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2014                        | 2015   | 2016 | 2017  | 2018  |
| 1  | Persentase pertumbuhan industry                            | 3,6%                 | 4,2    |      |      |          | 2,7%                       | 2,1   |      |      |       | 75%                         | 50%    |      |       |       |
| 2  | Jumlah produk OVOP dan KIID                                | 4 Produk             | 4      |      |      |          | 3 Produk                   | 2     |      |      |       | 75%                         | 50%    |      |       |       |
| 3  | Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB        | 10,8%                | 15,2   | 5    | 19   |          | 10%                        | 19,5  | 5    | 19   | 18,44 | 76,34                       | 128,29 | 100  | 100   | 97,05 |
| 4  | Jumlah klaster industri pengolahan                         | 1 buah               | 2      |      |      |          | 1 buah                     | 2     |      |      |       | 50                          | 100    |      |       |       |
| 5  | Jumlah desain produk unggulan daerah                       | 4 desain produk      | 7      | 8    | 7    | 12       | 2 produk                   | 5     | 6    | 7    | 6     | 40                          | 71,42  | 75   | 100   | 85,71 |
| 6  | Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah                  | 4 teknologi          | 6      |      |      |          | 2 teknologi                | 2     |      |      |       | 50                          | 33,34  |      |       |       |
| 7  | Disparitas harga antar wilayah                             | 10%                  | 8      | 8    | 7    | 4%       | 5%                         | 7,5   | 7    | 5    | 7     | 50                          | 93,75  | 87,5 | 71,43 | 7     |
| 8  | Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun | 30                   | 25     | 30   | 15   | 10 item  | 31                         | 21    | 24   | 14   | 0     | 96,67                       | 84     | 80   | 93,3  |       |
| 9  | Jumlah penurunan impor barang konsumsi                     | 129,70               | 103,76 |      |      |          | 397,44                     | 496   |      |      |       | 306,43                      | 481,50 |      |       |       |
| 10 | Nilai ekspor non migas                                     | 18,31                | 18,67  |      | 7    | 5 M US\$ | 15,24                      | 11,68 | 13,8 | 12   | 13,79 | 84,06                       | 62,56  |      | 171,4 |       |
| 11 | Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk            | 3                    | 3      |      |      |          | 4                          | 4     |      |      |       | 133                         | 133    |      |       |       |
| 12 | 1. Jumlah koperasi berkualitas                             | 200                  | 250    |      |      | 500      | 189                        | 250   |      |      |       | 94,50                       | 100    |      |       |       |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                | Target Renstra Tahun |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |        |       |       |        |
|----|---|----------------------|------|------|------|------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|-------|-------|--------|
|    |   | 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                       | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2014                        | 2015   | 2016  | 2017  | 2018   |
|    | Jumlah kopaerasi ungggulan  |                      |      | 30   | 30   |      |                            |       | 30    | 30    | 61    |                             |        | 100   | 100   |        |
| 13 | Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM                        | 15%                  | 18   | 20   | 3    | 40   | 12,39                      | 14,82 | 15    | 12,18 | 12.83 | 82,60                       | 82,30  | 75    | 40,6  |        |
| 14 | Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM | 57%                  | 60   | 65   | 67   | 70   | 52%                        | 56,77 | 68,85 | 68,85 | 68.85 | 91,23                       | 94,61  | 105,9 | 102,8 |        |
| 15 | Penumbuhan jumlah WUB   | 1000                 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040                       | 1040  | 760   | 1200  | 1459  | 104                         | 104,   | 70,82 | 120   | 145.9  |
| 16 | Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB  | 300                  | 150  | 300  | 300  | 300  | 437                        | 155   | 200   | 155   | 325   | 146                         | 103.30 | 200   | 51,7  | 108.33 |
| 17 | Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM                    | 150                  | 80   |      |      |      | 233                        | 85    |       |       |       | 155                         | 105,30 |       |       |        |
| 18 | Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kontak dagang                        | 50                   | 50   | 100  | 150  | 50   | 50                         | 60    | 75    | 60    | 210   | 100                         | 120    | 75    | 40    | 140    |
| 19 | Jumlah Koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan                             | 150                  | 150  | 25   | 300  | 150  | 71                         | 344   | 20    | 344   | 407   | 47,33                       | 229,30 | 80    | 114,7 |        |
| 20 | Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan                    | 100                  | 100  |      |      |      | 55                         | 200   |       |       |       | 55                          | 200    |       |       |        |
| 21 | Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi                   | 50                   | 60   | 25   | 25   | 80   | 49                         | 46    | 20    | 5     | 7     | 98                          | 76,67  | 80    | 20    |        |
| 22 | Jumlah sarana pelayanan public  | 10                   | 10   | 10   | 10   | 11   | 8                          | 10    | 10    | 10    | 10    | 80                          | 100    | 100   | 100   | 100    |
| 23 | Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi           | 6                    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6                          | 6     | 6     | 6     | 6     | 100                         | 100    | 100   | 100   | 100    |

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                          | Target Renstra Tahun |       |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun Ke |       |       |       |      | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |      |      |      |
|----|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------|------|------|------|
|    |   | 2019                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023* | 2019                       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan non Batubara thd PDRB (%)       | 7,46                 | 8,24  | 9,44  | 9,64  |       | 7,46                       | 8,24  | 7,79  | 8,24  |      | 100                         | 100  | 83   | 85   |
| 2  | Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)                         | 11,76                | 12,87 | 1,7   | 1,72  |       | 11,76                      | 12,87 | 4,75  | 5,01  |      | 100                         | 100  | 279  | 0    |
| 3  | Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)                                       | 15,07                | 15,07 | 12,92 | 13    |       | 15,07                      | 15,07 | 15,13 | 15,13 |      | 100                         | 100  | 0    | 116  |
| 4  | Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%) | 7,79                 | 1,43% | 3,38% | 4,17% |       | 7,79                       | 1,43% | 2,09  | 3,38  |      | 100                         | 100  | 6183 | 8106 |
| 6  | Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim           | -                    | -     | 17,55 | 18,25 |       | -                          | -     | 20,23 | 18,83 |      | 0                           | 0    | 115  | 103  |



| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Tahun |      |      |      |       | Realisasi Capaian Tahun Ke |      |       |       |      | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |      |      |      |
|----|--|----------------------|------|------|------|-------|----------------------------|------|-------|-------|------|-----------------------------|------|------|------|
|    |  | 2019                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2019                       | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | 2019                        | 2020 | 2021 | 2022 |
| 7  | Disparitas harga antar wilayah %                           | 13,8                 | 16,4 | 18   | 18   |       | 13,8                       | 16,4 | 11,52 | 18,47 |      | 100                         | 100  | 64   | 103  |
| 8  | Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)                          | 38.4                 | 51,3 | 54   | 53   |       | 38.4                       | 51,3 | 52,57 | 55,25 |      | 0                           | 100  | 97   | 104  |
| 9  | Nilai Omset Koperasi (Milyar)                              | 998                  | 849  | 872  | 907  |       | 998                        | 849  | 1100  | 1297  |      | 100                         | 100  | 126  | 143  |
| 10 | Nilai Omset UKM (Trilyun)                                  | 2,9                  | 3,5  | 50   | 52   |       | 2,9                        | 3,5  | 76,8  | 77    |      | 100                         | 100  | 154  | 148  |

\*realisasi tahun 2023 adalah estimasi

Berikut analisis table 8 untuk indikator kinerja pada tahun 2019-2022:

1. Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan non Batubara terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 7,46%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 7,46%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 8,24%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 8,24%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 9,44%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 7,79%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 83%
- Target Renstra Tahun 2022: 9,64%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 8,24%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 85%

2. Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$):

- Target Renstra Tahun 2019: 11,76 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 11,76 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 12,87 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 12,87 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 1,7 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 4,75 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 279%
- Target Renstra Tahun 2022: 1.72 Miliar US\$
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 5,01 Miliar US\$
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 0%

3. Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 15,07%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 15,07%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 15,07%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 15,07%

- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 12,92%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 15,13%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 0%
- Target Renstra Tahun 2022: 13%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 15,13%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 116%

4. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 7,79%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 1,43%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 1,43%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 2,09%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 3,38%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 3,38%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 6183%
- Target Renstra Tahun 2022: 4,17%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 8106%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 100%

6. Persentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim:

- Target Renstra Tahun 2021: 17,55%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 20,23%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 115%
- Target Renstra Tahun 2022: 18,25%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 18,83%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 103%

7. Disparitas harga antar wilayah (%):

- Target Renstra Tahun 2019: 13,8%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 13,8%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 16,4%

- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 16,4%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 18%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 11,52%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 64%
- Target Renstra Tahun 2022: 18%
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 18,47%
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 103%

8. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK):

- Target Renstra Tahun 2019: 38.4
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 38.4
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 0%
- Target Renstra Tahun 2020: 51.3
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 51.3
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 54
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 52,57
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 97%
- Target Renstra Tahun 2022: 53
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 55,25
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 104%

9. Nilai Omset Koperasi (Milyar):

- Target Renstra Tahun 2019: 998 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 998 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 849 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 849 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 872 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 1,100 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 126%
- Target Renstra Tahun 2022: 907 Milyar
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 1,297 Milyar
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 143%

10. Nilai Omset UKM (Trilyun):

- Target Renstra Tahun 2019: 2,9 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2019: 2,9 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2019: 100%
- Target Renstra Tahun 2020: 3,5 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2020: 3,5 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2020: 100%
- Target Renstra Tahun 2021: 50 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2021: 76,8 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2021: 154%
- Target Renstra Tahun 2022: 52 Trilyun
- Realisasi Capaian Tahun Ke 2022: 77 Trilyun
- Rasio Capaian pada Tahun Ke 2022: 148%

Tabel di atas memberikan informasi tentang target dan realisasi capaian pada berbagai indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam periode 2019-2022.

Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berupa PAD (Pendapat Asli Daerah) bersumber dari Hasil Retribusi Daerah realisasinya selama 5(lima) tahun terakhir (2018 s/d 2022) dapat tercapai dan bahkan melebihi dari target.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung realisasinya selama lima tahun terakhir (2015 s/d 2018) bervariasi akan tetapi selalu diatas 90 persen.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 9. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan tahun 2019 s.d 2023 Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha

| URAIAN   | Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |      |      |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                      |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |       |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|--|-------------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|---|-------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|  | 2019                    | 2020                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                              | 2020                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran              | Realisasi |
| -1   | -2                      | -3                   | -4   | -5   | -6   | -7                                | -8                   | -9   | -10  | -11  | -12   | -13   | -14  | -15  | -16  | -17                   | -18       |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 4.292.811.500           | 4.183.145.018        |      |      |      | 2.996.178.554                     | 4.024.922.212        |      |      |      | 69,80   | 96,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62                  | 34,34     |
| Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur  | 3.726.148.500           | 2.740.508.657        |      |      |      | 3.468.364.140                     | 2.391.972.222        |      |      |      | 93,08   | 87,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,97                 | -31,03    |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah                                    | <b>1.576.015.000</b>    | <b>1.327.775.000</b> |      |      |      | <b>1.561.081.214</b>              | <b>1.207.951.430</b> |      |      |      | 99,05   | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70                 | -22,62    |
| Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | 1.066.200.000           | 911.306.492          |      |      |      | 933.379.830                       | 894.498.198          |      |      |      | 87,54   | 98,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00                 | -4,17     |
| Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif                              | 1.194.160.000           |                      |      |      |      | 1.121.651.700                     |                      |      |      |      | 93,93   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | -100,00   |
| Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah              | 571.570.000             |                      |      |      |      | 515.599.076                       |                      |      |      |      | 90,21   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | -100,00   |



| URAIAN  | Anggaran Pada Tahun Ke- |               |      |      |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |               |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |       |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------|---------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|------|------|------|---|-------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2019                    | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                              | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran              | Realisasi |
| -1  | -2                      | -3            | -4   | -5   | -6   | -7                                | -8            | -9   | -10  | -11  | -12   | -13   | -14  | -15  | -16  | -17                   | -18       |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                       | 4.441.790.000           |               |      |      |      | 4.326.123.237                     |               |      |      |      | 97,40   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | -100,00   |
| Program Penataan Struktur Industri  | 626.000.000             |               |      |      |      | 572.891.667                       |               |      |      |      | 91,52   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | -100,00   |
| Program Peningkatan Dan Pengembangan Industri   | 2.604.800.000           |               |      |      |      | 2.441.033.750                     |               |      |      |      | 93,71   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | -100,00   |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                                  | 971.600.000             |               |      |      |      | 920.099.800                       |               |      |      |      | 94,70   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | -100,00   |
| Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan   | 1.079.400.000           |               |      |      |      | 1.039.014.500                     |               |      |      |      | 96,26   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | -100,00   |
| Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor   | 737.000.000             |               |      |      |      | 710.218.000                       |               |      |      |      | 96,37   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                  | -100,00   |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Menengah | 923.136.000             | 733.950.000   |      |      |      | 893.095.330                       | 698.566.230   |      |      |      | 96,75   | 95,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78                 | -21,78    |
| Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Ukm                         |                         | 4.052.304.000 |      |      |      |                                   | 3.592.606.555 |      |      |      | 0,00  | 88,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00               | 0,00      |

| URAIAN  | Anggaran Pada Tahun Ke- |               |      |      |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |               |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |       |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------|---------------|------|------|------|-----------------------------------|---------------|------|------|------|---|-------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2019                    | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2019                              | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran              | Realisasi |
| -1  | -2                      | -3            | -4   | -5   | -6   | -7                                | -8            | -9   | -10  | -11  | -12   | -13   | -14  | -15  | -16  | -17                   | -18       |
| Program Peningkatan Dan Pengembangan Industri               |                         | 2.290.825.000 |      |      |      |                                   | 2.215.092.165 |      |      |      | 0,00  | 96,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00               | 0,00      |
| Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan    | 2.150.000.000           | 987.070.000   |      |      |      | 1.855.363.111                     | 950.864.500   |      |      |      | 86,30   | 96,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,82                | 0,00      |
| Program Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan            |                         | 1.612.280.000 |      |      |      |                                   | 1.553.841.680 |      |      |      | 0,00  | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00               | 0,00      |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  | 1.132.000.000           | 1.358.680.988 |      |      |      | 1.090.481.850                     | 1.280.582.172 |      |      |      | 96,33   | 94,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,68                | 17,43     |
| Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur           | 320.400.000             | 637.518.500   |      |      |      | 357.177.400                       | 575.007.419   |      |      |      | 111,48  | 90,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,74                | 60,99     |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | 308.100.000             | 324.750.000   |      |      |      | 307.320.460                       | 305.815.628   |      |      |      | 99,75   | 94,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,13                 | -0,49     |
| Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang                  | 1.924.400.000           | 989.407.500   |      |      |      | 1.948.422.494                     | 884.392.948   |      |      |      | 101,25  | 89,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50                 | -54,61    |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  | 1.209.200.000           | 1.430.090.668 |      |      |      | 1.112.899.569                     | 1.343.326.400 |      |      |      | 92,04   | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,45                | 20,71     |
| Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur           | 622.650.000             | 861.200.000   |      |      |      | 547.365.638                       | 777.555.019   |      |      |      | 87,91   | 90,29 | 0,00 | 0,00 | 0    | -27,70                | 42,05     |

| URAIAN  | Anggaran Pada Tahun Ke- |             |                |                |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |             |                |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |       |       |        |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---|-------|-------|--------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2019                    | 2020        | 2021           | 2022           | 2023          | 2019                              | 2020        | 2021           | 2022          | 2023          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 | Anggaran              | Realisasi |
| -1  | -2                      | -3          | -4             | -5             | -6            | -7                                | -8          | -9             | -10           | -11           | -12   | -13   | -14   | -15    | -16  | -17                   | -18       |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah             | 409.900.000             | 319.560.000 |                |                |               | 379.938.300                       | 303.641.397 |                |               |               | 92,69   | 95,02 | 0,00  | 0,00   | 0    | 28,27                 | 0,00      |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                   |                         |             | 36.734.778.108 |                |               |                                   |             | 31.799.481.677 |               |               | 0,00  | 0,00  | 86,57 | 100,00 | 100  | 0,00                  | 0,00      |
| Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi                            |                         |             | 500.000.000    | -              | -             |                                   |             | 498.688.330    |               |               | 0,00  | 0,00  | 99,74 | 0,00   | 0    | 0,00                  | 0,00      |
| Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                          |                         |             | 3.387.679.890  | 782.356.000    | 1.593.231.000 |                                   |             | 2.937.321.843  | 748.659.100   | 1.593.231.000 | 0,00  | 0,00  | 86,71 | 95,69  | 100  | -50,90                | 0,00      |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) |                         |             | 500.000.000    | 32.418.126.000 | 463.700.000   |                                   |             | 436.292.550    |               | 463.700.000   | 0,00  | 0,00  | 87,26 | 0,00   | 100  | 6891,19               | 0,00      |
| Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                             |                         |             |                | 731.659.500    | 583.040.000   |                                   |             |                | 705.461.493   | 583.040.000   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 96,42  | 100  | 25,49                 | 0,00      |
| Program Pengembangan Umkm   |                         |             | 500.000.000    | 8.779.714.000  | 327.600.000   |                                   |             | 498.824.200    | 8.108.087.742 | 327.600.000   | 0,00  | 0,00  | 99,76 | 92,35  | 100  | 2580,01               | 0,00      |
| Program Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian                          |                         |             |                |                | 2.222.710.000 |                                   |             |                |               |               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0    | 0,00                  | 0,00      |

| URAIAN  | Anggaran Pada Tahun Ke- |      |               |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |      |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |       |        |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---|------|-------|--------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2019                    | 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2019                              | 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | Anggaran              | Realisasi |
| -1  | -2                      | -3   | -4            | -5            | -6            | -7                                | -8   | -9            | -10           | -11           | -12   | -13  | -14   | -15    | -16  | -17                   | -18       |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |                         |      | 1.000.000.000 | 1.815.264.834 | 1.315.400.000 |                                   |      | 804.479.650   | 1.815.264.834 | 1.315.400.000 | 0,00  | 0,00 | 80,45 | 100,00 | 100  | 38,00                 | 0,00      |
| Program Pengembangan Ekspor   |                         |      | 1.000.000.000 | 1.185.650.240 | 1.736.027.000 |                                   |      | 682.531.738   | 556.639.658   | 1.736.027.000 | 0,00  | 0,00 | 68,25 | 46,95  | 100  | -31,70                | 0,00      |
| Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                |                         |      | 800.000.000   | 722.960.880   | 995.820.000   |                                   |      | 625.899.800   | 434.599.325   | 995.820.000   | 0,00  | 0,00 | 78,24 | 60,11  | 100  | -27,40                | 0,00      |
| Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen                      |                         |      | 4.864.797.628 | 8.057.968.737 | 5.368.554.700 |                                   |      | 3.865.445.858 | 8.057.968.737 | 5.368.554.700 | 0,00  | 0,00 | 79,46 | 100,00 | 100  | 50,10                 | 0,00      |
| Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                        |                         |      | 2.000.000.000 | 3.818.212.642 | 2.984.344.373 |                                   |      | 587.368.100   | 3.818.212.642 | 2.984.344.373 | 0,00  | 0,00 | 29,37 | 100,00 | 100  | 27,94                 | #DIV/0!   |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri                            |                         |      | 3.000.000.000 | 845.930.000   | 2.078.142.632 |                                   |      | 2.125.162.598 | 477.339.699   | 670.858.000   | 0,00  | 0,00 | 70,84 | 56,43  | 32   | -59,29                | #DIV/0!   |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional              |                         |      | 600.000.000   | 627.380.000   | 943.439.586   |                                   |      | 279.319.098   | 419.181.190   | 454.000.000   | 0,00  | 0,00 | 46,55 | 66,81  | 48   | -33,50                | #DIV/0!   |

Diliat dari tabel 9 diatas terjadi perubahan anggaran maupun realisasi karena adanya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 10. Realisasi APBN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

| No                | Sumber Dana                   | Tahun 2018           | Tahun 2019           | Tahun 2020           | Tahun 2021           | Tahun 2022           |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                 | Kementerian Koperasi & UKM RI | 2.469.138.756        | 2.525.071.000        | 1.942.830.000        | 1.812.844.000        | 6.249.930.000        |
| 2                 | Kementerian Perdagangan RI    | 1.752.711.300        | 1.928.021.000        | 850.668.659          | 1.005.973.491        | 980.181.000          |
| 3                 | Kementerian Perindustrian RI  | 1.671.000.000        | 2.101.771.000        | 1.471.527.100        | 788.563.896          | 973.000.000          |
| <b>Total APBN</b> |                               | <b>5.892.850.056</b> | <b>6.554.863.000</b> | <b>4.265.025.759</b> | <b>3.607.381.387</b> | <b>8.203.111.000</b> |

Tabel 11. Kinerja Pelayanan Pendapatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s/d 2022

| No | Kegiatan  | Realisasi     |               |               |               |                                | 2021                           | 2022                           |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|    |   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020                           |                                |                                |
| 1  | Retribusi Pengujian dan Kalibrasi (juta Rupiah)     | 285.945.000,- | 370.216.000,- | 517.881.800,- | 721.561.600,- | 680.474.800,-                  | 761.123.200                    | 877.230.501                    |
| 2  | Pengujian   |               |               |               |               |                                |                                |                                |
| 3  | Pelatihan   |               |               |               |               |                                |                                |                                |
| 4  | Pemakaian Kekayaan Daerah                           |               |               |               |               |                                |                                |                                |
| 5  | Retribusi Surat Keterangan Asal (SKA) (Juta Rupiah) |               |               | 128.500.000   | 108.500.000   | Tidak ada Langsung ke Kemenkeu | Tidak ada Langsung ke Kemenkeu | Tidak ada Langsung ke Kemenkeu |

**Tabel 12.** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun |        |      |      |          | Realisasi Capaian Tahun Ke |       |      |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |        |      |       |       |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------|------|------|----------|----------------------------|-------|------|-------|-------|-----------------------------|--------|------|-------|-------|
|    |  |             |            |                          | 2014                 | 2015   | 2016 | 2017 | 2018     | 2014                       | 2015  | 2016 | 2017  | 2018  | 2014                        | 2015   | 2016 | 2017  | 2018  |
| 1  | Persentase pertumbuhan industri                            |             |            |                          | 3,6%                 | 4,2    |      |      |          | 2,7%                       | 2,1   |      |       |       | 75%                         | 50%    |      |       |       |
| 2  | Jumlah produk OVOP dan KIID                                |             |            |                          | 4 Produk             | 4      |      |      |          | 3 Produk                   | 2     |      |       |       | 75%                         | 50%    |      |       |       |
| 3  | Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB        |             |            |                          | 10,8%                | 15,2   | 5    | 19   |          | 10%                        | 19,5  | 5    | 19    | 18,44 | 76,34                       | 128,29 | 100  | 100   | 97,05 |
| 4  | Jumlah klaster industri pengolahan                         |             |            |                          | 1 buah               | 2      |      |      |          | 1 buah                     | 2     |      |       |       | 50                          | 100    |      |       |       |
| 5  | Jumlah desain produk unggulan daerah                       |             |            |                          | 4 desain produk      | 7      | 8    | 7    | 12       | 2 produk                   | 5     | 6    | 7     | 6     | 40                          | 71,42  | 75   | 100   | 85,71 |
| 6  | Jumlah rekayasa TTG sesuai potensi daerah                  |             |            |                          | 4 teknologi          | 6      |      |      |          | 2 teknologi                | 2     |      |       |       | 50                          | 33,34  |      |       |       |
| 7  | Disparitas harga antar wilayah                             |             |            |                          | 10%                  | 8      | 8    | 7    | 4%       | 5%                         | 7,5   | 7    | 5     | 7     | 50                          | 93,75  | 87,5 | 71,43 | 7     |
| 8  | Jumlah barang dan jasa yang tidak sesuai standar per tahun |             |            |                          | 30                   | 25     | 30   | 15   | 10 item  | 31                         | 21    | 24   | 14    | 0     | 96,67                       | 84     | 80   | 93,3  |       |
| 9  | Jumlah penurunan impor barang konsumsi                     |             |            |                          | 129,70               | 103,76 |      |      |          | 397,44                     | 496   |      |       |       | 306,43                      | 481,50 |      |       |       |
| 10 | Nilai ekspor non migas                                     |             |            |                          | 18,31                | 18,67  |      | 7    | 5 M US\$ | 15,24                      | 11,68 | 13,8 | 12    | 13,79 | 84,06                       | 62,56  |      | 171,4 |       |
| 11 | Jumlah kemampuan pengujian pada komoditi produk            |             |            |                          | 3                    | 3      |      |      |          | 4                          | 4     |      |       |       | 133                         | 133    |      |       |       |
| 12 | 1. Jumlah koperasi berkualitas                             |             |            |                          | 200                  | 250    |      |      | 500      | 189                        | 250   |      |       |       | 94,50                       | 100    |      |       |       |
|    | Jumlah kopaerasi unggulan                                  |             |            |                          |                      |        | 30   | 30   |          |                            |       | 30   | 30    | 61    |                             |        | 100  | 100   |       |
| 13 | Persentase Sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UMKM         |             |            |                          | 15%                  | 18     | 20   | 3    | 40       | 12,39                      | 14,82 | 15   | 12,18 | 12,83 | 82,60                       | 82,30  | 75   | 40,6  |       |



| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun Ke |        |       |       |        |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|----------------------|------|------|------|------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|-------|-------|--------|
|    |   |             |            |                          | 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                       | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2014                        | 2015   | 2016  | 2017  | 2018   |
| 14 | Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM |             |            |                          | 57%                  | 60   | 65   | 67   | 70   | 52%                        | 56,77 | 68,85 | 68,85 | 68,85 | 91,23                       | 94,61  | 105,9 | 102,8 |        |
| 15 | Penumbuhan jumlah WUB   |             |            |                          | 1000                 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1040                       | 1040  | 760   | 1200  | 1459  | 104                         | 104,   | 70,82 | 120   | 145.9  |
| 16 | Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB  |             |            |                          | 300                  | 150  | 300  | 300  | 300  | 437                        | 155   | 200   | 155   | 325   | 146                         | 103.30 | 200   | 51,7  | 108.33 |
| 17 | Jumlah sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan UMKM                    |             |            |                          | 150                  | 80   |      |      |      | 233                        | 85    |       |       |       | 155                         | 105,30 |       |       |        |
| 18 | Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kontak dagang                        |             |            |                          | 50                   | 50   | 100  | 150  | 50   | 50                         | 60    | 75    | 60    | 210   | 100                         | 120    | 75    | 40    | 140    |
| 19 | Jumlah Koperasi/UMKM yang melakukan kemitraan                             |             |            |                          | 150                  | 150  | 25   | 300  | 150  | 71                         | 344   | 20    | 344   | 407   | 47,33                       | 229,30 | 80    | 114,7 |        |
| 20 | Jumlah koperasi/ UMKM yang mendapat program pembiayaan                    |             |            |                          | 100                  | 100  |      |      |      | 55                         | 200   |       |       |       | 55                          | 200    |       |       |        |
| 21 | Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi                   |             |            |                          | 50                   | 60   | 25   | 25   | 80   | 49                         | 46    | 20    | 5     | 7     | 98                          | 76,67  | 80    | 20    |        |
| 22 | Jumlah sarana pelayanan publik  |             |            |                          | 10                   | 10   | 10   | 10   | 11   | 8                          | 10    | 10    | 10    | 10    | 80                          | 100    | 100   | 100   | 100    |
| 23 | Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi           |             |            |                          | 6                    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6                          | 6     | 6     | 6     | 6     | 100                         | 100    | 100   | 100   | 100    |

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

| Uraian  | Anggaran Pada Tahun Ke- |                |               |               |               | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke |       |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |                  |
|---|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------------------|
|   | 2014                    | 2015           | 2016          | 2017          | *2018         | 2014                              | 2015           | 2016          | 2017          | 2018          | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Anggaran              | Realisasi        |
| <b>Urusan Wajib Koperasi</b>                          |                         |                |               |               |               |                                   |                |               |               |               |  |       |       |       |       |                       |                  |
| Pengembangan Koperasi                                 | 32,025,863,750          | 11,024,600,000 | 7,887,294,200 | 3,300,000,000 | 3,997,550,000 | 22,152,152,282                    | 8,782,790,837  | 7,546,295,359 | 3,274,834,001 | 3,968,054,923 | 69.17  | 79.67 | 95.68 | 99.24 | 99.26 | 11,647,061,590        | 8,608,081,015.80 |
| Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perindagkop&UKM  | 5,263,161,156           | 3,817,683,400  | 2,284,195,500 | 574,150,000   | 598,250,000   | 3,161,767,046                     | 2,995,542,408  | 1,990,088,098 | 511,039,240   | 571,458,400   | 60.07  | 78.46 | 87.12 | 89.01 | 95.52 | 2,507,488,011         | 1,810,221,538.40 |
| Belanja Rutin Dinas                                   | 8,636,000,000           | 9,267,270,000  | 6,186,343,540 | 9,024,300,000 | 6,668,419,000 | 7,215,445,101                     | 8,111,044,170  | 5,733,570,309 | 7,932,574,072 | 6,456,788,998 | 83.55  | 87.52 | 92.68 | 87.90 | 96.83 | 7,956,466,508         | 6,313,401,413.80 |
| <b>Urusan Perindustrian</b>                           |                         |                |               |               |               |                                   |                |               |               |               |  |       |       |       |       |                       |                  |
| Kegiatan Pemberdayaan Industri                        | 6,567,805,000           | 9,740,300,000  | 4,181,623,425 | 950,000,000   | 1,253,000,000 | 5,661,855,182                     | 7,962,900,806  | 3,804,280,957 | 937,717,270   | 1,237,765,563 | 86.21  | 81.73 | 90.98 | 98.71 | 98.78 | 4,538,545,685         | 3,721,731,963    |
| <b>Urusan Perdagangan</b>                             |                         |                |               |               |               |                                   |                |               |               |               |  |       |       |       |       |                       |                  |
| Kegiatan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (P2LN)  | 2,092,838,000           | 2,765,750,000  | 2,403,686,250 |               |               | 2,043,778,050                     | 2,563,908,313  | 2,364,409,650 |               |               | 97.66  | 92.70 | 98.37 |       |       | 2,420,758,083         | 2,324,032,003    |
| Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (P2DN) | 11,485,970,250          | 3,709,011,600  | 2,712,715,109 |               |               | 9,556,069,890                     | 3,376,207,781  | 2,295,825,200 |               |               | 83.20  | 91.03 | 84.63 |       |       | 5,969,232,320         | 5,076,034,290    |
| Pengawasan Barang dan Jasa                            |                         |                |               | 493,750,000   | 500,000,000   |                                   |                |               | 463,290,800   | 430,775,293   |  |       |       | 93.83 | 86.16 | 496,875,000           | 332,122,173      |
| Perdagangan   |                         |                |               | 330,000,000   | 673,250,000   |                                   |                |               | 329,286,940   | 672,705,276   |  |       |       | 99.78 | 99.92 | 501,625,000           | 262,323,958      |
| <b>UPTD</b>   |                         |                |               |               |               |                                   |                |               |               |               |  |       |       |       |       |                       |                  |
| UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang      | 14,704,530,000          | 8,166,535,000  | 3,933,053,850 | 704,800,000   | 1,000,000,000 | 13,389,172,231                    | 7,522,773,543  | 3,763,496,072 | 677,198,630   | 996,240,781   | 91.03  | 92.12 | 95.69 | 96.08 | 99.62 | 5,701,783,770         | 5,119,896,481    |
| UPTD Pusat Pelatihan Koperasi                         | 4,127,812,500           | 5,470,750,000  | 3,118,547,000 | 661,000,000   | 862,000,000   | 3,985,851,684                     | 5,302,963,378  | 2,691,081,278 | 637,277,800   | 824,430,050   | 96.56  | 96.93 | 86.29 | 96.41 | 95.64 | 2,848,021,900         | 2,553,716,668    |
| UPTD Metrologi  | 10,916,821,875          | 33,499,741,850 | 2,642,598,476 |               |               | 9,609,188,426                     | 27,678,236,111 | 2,496,083,607 |               |               | 88.02  | 82.62 | 94.46 |       |       | 15,686,387,400        | 13,261,169,381   |

## **2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan**

### **DISPERINDAGKOP dan UKM Provinsi Kalimantan Timur**

Berikut ini adalah peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur.

#### **2.4.1 Peluang**

1. Kebijakan-kebijakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Peluang Pasar Ekspor yang cukup banyak.
3. Meningkatnya jumlah pasar di daerah.
4. Peraturan daerah terkait pemberdayaan Koperasi dan UKM, Kerjasama dengan Perusahaan Industri Tambang dan jasa melalui Program CSR.
5. Program Pembiayaan baik melalui dana bergulir maupun dari bank dan non bank.

#### **2.4.2 Tantangan**

1. Isu negatif HaKI, HAM Lingkungan dan Perdagangan Bebas masih berkembang.
2. Potensi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui akan habis.
3. Koordinasi Kab/Kota ke Provinsi belum maksimal.
4. Banyaknya usaha -usaha baru melalui on line dan retail modern.
5. Adanya pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi atau melakukan usaha hanya untuk mendapatkan bantuan.
6. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean Th 2015, ACFTA, AFTA, Globalisasi.
7. Kepentingan pemanfaatan lahan sector pertambangan dan gas termasuk batubara lebih dominan dibandingkan sektor lain, terutama usaha pertanian dan Perkebunan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

### DAERAH

#### 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara normatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, dipilah berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 14 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

| MASALAH POKOK   | MASALAH  | AKAR MASALAH  |
|---|--|---|
| Rendahnya kontribusi UMKM & koperasi terhadap perekonomian daerah | Belum optimalnya kualitas usaha koperasi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi</li> <li>•Rendahnya Kualitas SDM Koperasi</li> <li>•Lemahnya sistem pengawasan koperasi</li> </ul>  |
|   | Rendahnya Produktivitas UKM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital</li> </ul> <p>Aspek produksi dan restrukturisasi usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi</li> <li>2. Produk usaha mikro belum memenuhi standarisasi</li> <li>3. Banyaknya usaha mikro dan koperasi yang mengalami kemacetan usaha</li> </ol> <p>Rendahnya daya saing produk UKM</p> <p>Kurangnya informasi permodalan</p> |
| Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan                   | Belum optimalnya neraca perdagangan non-migas luar negeri            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kinerja peningkatan ekspor non-migas</li> <li>2. Belum optimalnya pengendalian impor</li> <li>3. Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional</li> </ol>   |
|   | Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya biaya distribusi dan logistik</li> <li>2. Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah (G to G)"</li> <li>3. Fluktuasi harga barang pokok dan penting</li> <li>4 Tingginya biaya Logistik (antar pulau), dikarenakan keterbatasan konektivitas angkutan laut di wilayah Indonesia"</li> </ol>                                    |
|   | Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar</li> <li>2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga</li> </ol>  |
|   | Belum optimalnya standarisasi mutu barang                            | Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi "Belum optimalnya pengembangan mutu tembakau"  |
| Belum Optimalnya Ekspor non migas dan non batubara                | Ekspor kaltim masih didominasi oleh produk primer (migas & batubara) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara</li> <li>•Belum Optimalnya Pemanfaatan/Peluang Ekspor Langsung di Kalimantan Timur</li> </ul>   |

| MASALAH POKOK  | MASALAH   | AKAR MASALAH   |
|--|---|--|
|  | Rendahnya Daya Saing Produk yang Dipasarkan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi &amp; Produk Ekspor</li> <li>•Minimnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok <ul style="list-style-type: none"> <li>•Belum Optimalnya Fasilitasi Sistem Distribusi Perdagangan</li> </ul> </li> <li>•Belum Optimalnya Kerjasama Perdagangan</li> </ul>   |
|  | Kebutuhan pangan kaltim tergantung dari luar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Belum adanya entitas yang menjadi food station daerah</li> </ul>   |
| Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan | Belum optimalnya progress pengembangan kawasan industri prioritas provinsi                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah</li> </ul>   |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Terbatasnya sumber daya manusia industri</li> </ul>  |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kelembagaan industri belum efektif</li> <li>•Minimnya pembinaan pengembangan wirausaha IKM.</li> </ul>   |
| Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan | Belum maksimalnya daya saing dan daya tarik investasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumpang tindih kepemilikan lahan.</li> <li>2. Tingginya harga lahan.</li> <li>3. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri dan penunjang.</li> <li>4. Koordinasi, sinkronisasi dan komitmen antar organisasi belum optimal.</li> <li>5. Kinerja kelembagaan dalam membangun dan mengelola kawasan belum optimal.</li> <li>6. Belum optimalnya penerapan dan pengawasan standar produk.</li> </ol>                          |
|  | Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia industri   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum sesuai lulusan SLTA dengan kebutuhan industri.</li> <li>2. Rendahnya kapasitas keterampilan dan penguasaan teknologi.</li> <li>3. Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas.</li> <li>4. Kurangnya kerjasama lembaga pendidikan/pelatihan dan pelaku industri dalam pemenuhan tenaga kerja industri.</li> </ol>   |
|  | Belum kuatnya struktur industri di daerah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi industri hulu dan hilir antar sektor belum optimal.</li> <li>2. Belum maksimalnya upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan perijinan (Berbasis resiko).</li> <li>3. Belum terbangunnya basis data sektor industri.</li> <li>4. Belum optimalnya pemberdayaan industri melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis dan penyediaan fasilitas.</li> </ol> |

### 3.2 Isu Strategis

konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis, baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan Tiga tahun ke depan, Hal tersebut sejalan dengan amanat RPD Provinsi

Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama Tiga tahun ke depan (2024-2026).

berikut tabel isu strategis Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur :

**Tabel 15 Isu Strategis**

| <b>No</b> | <b>Isu Strategis</b>  |
|-----------|---|
| 1         | Rendah nya kinerja koperasi dan UKM, hilirasi produk non-migas dan non-batubara, ekspor non-migas dan non-batubara, serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat |
| 2         | Ditetapkan Ibukota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.   |

Penjelasan Tabel Diatas

1. Kinerja Koperasi dan UKM yang Rendah:

Koperasi dan UKM memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi

kesenjangan sosial. Namun, rendahnya kinerja koperasi dan UKM dapat menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi daerah. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja ini antara lain kurangnya akses ke modal, rendahnya kualitas manajemen, keterbatasan keterampilan teknis, serta kurangnya akses pasar dan peluang pemasaran.

2. Hilirasi Produk non-migas dan non-batubara yang Belum Optimal:

Hilirasi produk non-migas dan non-batubara merujuk pada proses penambahan nilai dan pengolahan produk sebelum mencapai konsumen akhir. Jika hilirasi ini tidak optimal, potensi ekonomi dari produk-produk tersebut tidak akan terwujud sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya hilirasi produk non-migas dan non-batubara meliputi infrastruktur yang terbatas, kurangnya keterampilan dalam pengolahan produk, serta kendala akses pasar dan distribusi.

3. Ekspor non-migas dan non-batubara yang Belum Optimal:

Ekspor non-migas dan non-batubara memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, rendahnya tingkat ekspor produk non-migas dan non-batubara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan dan akses pasar internasional, standar kualitas yang rendah, keterbatasan kapasitas produksi, serta kendala logistik dan infrastruktur yang terbatas.

4. Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat:

Ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga kesejahteraan penduduk. Jika ketersediaan kebutuhan pokok tidak optimal, dapat menyebabkan ketidakstabilan harga, kenaikan inflasi, dan kesulitan akses bagi masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya ketersediaan kebutuhan pokok

masyarakat meliputi kendala distribusi dan logistik, rendahnya produktivitas sektor pertanian, serta kurangnya diversifikasi sumber pangan.

## 5. Ditetapkan Ibukota Negara Nusantara di Provinsi

### Kalimantan Timur

Pengambilan keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sana adalah sebuah isu strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah beberapa isu strategis yang muncul terkait masuknya ibu kota IKN Nusantara di Kalimantan Timur:

**Dampak Lingkungan:** Pembangunan IKN Nusantara memerlukan luas tanah yang cukup besar, dan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak direncanakan dengan baik. Beberapa isu strategis terkait dengan dampak lingkungan ini adalah ketersediaan air, pengelolaan limbah, deforestasi, dan perubahan iklim.

**Infrastruktur:** Memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bandara, serta jaringan listrik dan telekomunikasi. Jika infrastruktur yang dibangun tidak cukup baik, maka dapat mempengaruhi kemudahan akses dan mobilitas warga, serta membatasi perkembangan ekonomi daerah.

**Kehidupan Sosial:** Masyarakat yang tinggal di sekitar IKN Nusantara harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, seperti adanya perubahan lingkungan, perubahan sosial, dan peningkatan harga tanah dan kebutuhan hidup. Selain itu, integrasi antara masyarakat lokal dan pendatang harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi konflik sosial.

**Ketersediaan Sumber Daya:** Pembangunan IKN Nusantara memerlukan sumber daya manusia dan finansial yang cukup besar. Selain itu, adanya perpindahan kantor-



kantor pemerintahan ke IKN Nusantara juga memerlukan ketersediaan tenaga kerja yang handal dan berkompeten. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang memadai juga harus diperhatikan.

Pengembangan Ekonomi: Masuknya IKN Nusantara ke Kalimantan Timur dapat meningkatkan potensi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan daerah, serta peluang investasi baru. Namun, harus diperhatikan pula agar pembangunan ekonomi tidak merugikan masyarakat lokal dan lingkungan sekitar.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, Tujuan Berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur yang Merupakan Sasaran RPD Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan RPD 2024-2026:

Tabel 16. Keterkaitan Sasaran RPD 2024-2026 Prov Kaltim dengan Tujuan Renstra 2024-2026 Disperindagkop

| <b>SASARAN RPD PROV KALTIM</b>  | <b>TUJUAN DISPERINDAGKOP</b>  |
|---|---|
| Sasaran 5 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi   | 1. Terwujudnya diversifikasi ekonomi sektor Industri  |
|   | 2. Terwujudnya diversifikasi ekonomi Sektor Perdagangan                                       |
| Sasaran 6 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin  | 3. Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.   |
| Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK | 4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas |

Penjelasan terhadap Tujuan Terwujudnya diversifikasi ekonomi adalah upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi yang beragam dan tidak tergantung pada yang saat ini berlangsung sector pertambangan. Diversifikasi ekonomi bertujuan untuk mengurangi risiko ketika terjadi perubahan dalam suatu sektor ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Diversifikasi ekonomi dapat terwujud dengan berbagai cara, antara lain:

Pengembangan sektor-sektor baru: Pemerintah dapat mempromosikan dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa depan, seperti sektor teknologi, industri kreatif, dan pariwisata.

Pengembangan sektor non-pertanian: Dalam banyak negara, sektor pertanian masih menjadi sektor utama dalam perekonomian. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi dapat dicapai dengan memperkuat sektor non-pertanian, seperti sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat memfasilitasi pengembangan sektor ekonomi yang baru dan berpotensi.

Pelibatan sektor swasta: Pemerintah dapat memfasilitasi pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan berpotensi. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau non-fiskal kepada perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor ekonomi baru dan berpotensi.

Diversifikasi ekonomi penting untuk meningkatkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan mengurangi risiko ketika terjadi perubahan dalam sektor ekonomi tertentu.

Tujuan meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dalam sektor koperasi dan UKM adalah untuk memberikan dukungan dan memperkuat sektor ini sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu Provinsi dengan Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat dalam sektor koperasi dan UKM akan membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki dan mengelola usaha mereka sendiri, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka sendiri serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi dan UKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan meningkatkan keberdayaan sektor ini, lebih banyak peluang kerja dapat tercipta bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang

berkembang. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Koperasi dan UKM seringkali berlokasi di daerah pedesaan atau pinggiran kota yang terpinggirkan. Meningkatkan keberdayaan sektor ini akan membantu mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah negara, mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Penjelasan tujuan Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas sebagai berikut :

**Akuntabilitas:** Tujuan ini mencakup tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam birokrasi yang akuntabel, pemerintah harus melibatkan mekanisme kontrol internal dan eksternal untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil, etis, dan legal. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan hasil kerjanya kepada masyarakat.

**Pelayanan publik berkualitas:** Birokrasi yang efektif harus mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, kesederhanaan, kesetaraan, dan responsivitas terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Tujuan ini melibatkan perbaikan proses administrasi, pengurangan birokrasi yang berlebihan, pelatihan dan pengembangan staf, serta penerapan teknologi informasi yang modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

**Keterlibatan masyarakat:** Birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, kebijakan dan program pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi: Penggunaan teknologi informasi yang efektif dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi publik, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi dan keandalan data.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya dalam hal perumusan kebijakan yang mendukung, reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai negeri, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, investasi dalam teknologi informasi, serta pendekatan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

### **1. Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan**

Sasaran peningkatan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Beberapa sasaran yang dapat diidentifikasi terkait peningkatan kontribusi industri pengolahan Kaltim antara lain Peningkatan produksi dan kualitas: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk industri pengolahan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM industri pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan internasional.

Diversifikasi produk: Sasaran ini bertujuan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan terhadap produk baru serta mengeksplorasi produk yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur.

Peningkatan ekspor: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk industri pengolahan dari Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas pasar ekspor,

mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, serta meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar internasional.

Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam transportasi, distribusi, dan penyimpanan produk industri pengolahan di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, menyediakan fasilitas pergudangan dan jaringan distribusi yang efisien, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri pengolahan di Kalimantan Timur.

Dengan implementasi sasaran-sasaran di atas, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Sasaran Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor.**

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditi di Kalimantan Timur, serta meningkatkan daya saing komoditi dan ekspor di pasar domestik dan internasional. Beberapa strategi untuk mencapai terkait peningkatan daya saing komoditi dan ekspor Kaltim, meningkatkan produksi komoditi dan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai dengan stake holder pengembangan teknologi pertanian dan peternakan yang modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta peningkatan keahlian petani dan peternak melalui pelatihan dan pendidikan, mengembangkan komoditi baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi komoditi yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur serta melakukan riset dan pengembangan terhadap komoditi, strategi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai melalui promosi dan branding produk, penyediaan informasi pasar dan pembeli potensial, serta kerjasama dengan pelaku bisnis dan

industri yang memiliki jaringan luas di pasar domestik dan internasional.

Untuk menunjang sasaran ini diawali Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan transportasi, pengiriman, dan distribusi produk komoditi di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan komoditi dan ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur transportasi, perbaikan jalur distribusi dan penyediaan fasilitas pergudangan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor komoditi dan ekspor di Kalimantan Timur.

### **3. Sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.**

Sasaran peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup konsumen di provinsi Kalimantan Timur Dalam sasaran ini, pemerintah berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada konsumen terhadap produk dan layanan yang berkualitas serta mengembangkan kapasitas konsumen untuk memahami dan menggunakan produk dan layanan secara efektif.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk dan layanan yang tersedia di Kaltim. Hal ini dapat dicapai dengan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang memproduksi produk dan layanan berkualitas tinggi, dan memperkuat kemitraan antara produsen dan konsumen. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempromosikan produk lokal yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, agar masyarakat lebih tertarik dan merasa bangga menggunakan produk-produk tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas konsumen juga menjadi fokus dalam sasaran ini. Pemerintah berupaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta cara memilih dan menggunakan produk dan layanan dengan bijak dan efektif. Dengan meningkatkan kapasitas konsumen, diharapkan konsumen akan lebih berdaya dalam mengambil

keputusan yang tepat dan menghindari penipuan atau penggunaan produk dan layanan yang berbahaya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi yang memadai mengenai produk dan layanan yang tersedia di pasar. Dengan adanya informasi yang akurat dan mudah diakses, konsumen akan lebih mudah memilih produk dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.

#### **4. Sasaran Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.**

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

#### **5. Sasaran Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi.**

Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi, dan ekspor non-migas di Kaltim adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perdagangan, industri, dan ekspor non-migas di provinsi tersebut. Sasaran ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kaltim dan meningkatkan daya saing produk dan komoditi di pasar global.



Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan efisiensi sistem distribusi perdagangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur logistik yang memadai, seperti pelabuhan, jalan tol, dan jaringan transportasi lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka distribusi komoditi dan produk non-migas di Kaltim dapat menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, arah kebijakan Pusat Distribusi ( Food Station ) lokasi pusat yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan barang ke pelanggan atau lokasi penjualan. Pusat distribusi dapat berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, serta sebagai pusat kontrol untuk pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan persediaan, Fungsi utama dari pusat distribusi adalah:

**Penyimpanan dan pengelolaan persediaan:** Pusat distribusi digunakan untuk menyimpan barang-barang dari berbagai produsen sehingga dapat dikirimkan ke berbagai tujuan secara efisien. Dalam pusat distribusi, persediaan barang dipantau dan dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup saat diperlukan.

**Pengolahan dan pengemasan:** Pusat distribusi sering kali dilengkapi dengan fasilitas untuk mengemas dan memproses barang sebelum dikirim ke tujuan akhir. Fasilitas ini mencakup pelabelan, pengemasan ulang, dan perakitan produk.

**Pengiriman dan distribusi:** Pusat distribusi berfungsi sebagai pusat pengiriman dan distribusi barang ke lokasi penjualan atau konsumen akhir. Pengiriman dilakukan melalui berbagai mode transportasi, termasuk truk, kapal, dan pesawat terbang.

**Pengendalian mutu dan audit:** Pusat distribusi juga digunakan untuk memeriksa kualitas dan keamanan produk sebelum dikirim ke pelanggan. Audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa proses distribusi berjalan dengan lancar dan efektif.

## **6. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop**

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kebijakan, program, dan anggaran di dalam Disperindagkop. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan, audit internal, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Melalui transparansi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan tentang kinerja dan penggunaan sumber daya Disperindagkop.

Mengembangkan indikator kinerja yang jelas: Disperindagkop perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, Disperindagkop dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat mencakup aspek-aspek seperti peningkatan jumlah perizinan usaha, peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan, peningkatan pendapatan koperasi, dan sebagainya.

Meningkatkan partisipasi masyarakat: Disperindagkop perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program di sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Melalui partisipasi masyarakat, kebijakan dan program yang diimplementasikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Disperindagkop dapat melakukan berbagai bentuk partisipasi, seperti melalui konsultasi publik, dialog dengan pelaku usaha, atau pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Meningkatkan kualitas layanan publik: Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh Disperindagkop kepada masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi, responsivitas terhadap permintaan dan keluhan masyarakat, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas. Disperindagkop dapat melakukan langkah-langkah seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, pelatihan staf dalam pelayanan publik yang baik, dan pengembangan sistem umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diberikan.

**7. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat dijelaskan sebagai perbaikan dan peningkatan transparansi, tanggung jawab, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang:

**Transparansi:** UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menerapkan praktik-praktik transparan dalam operasionalnya. Ini berarti memberikan akses informasi yang mudah dipahami dan komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur pengujian, kriteria sertifikasi mutu barang, biaya yang terkait, dan hasil pengujian.

**Standar dan Kualitas:** UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas pelayanan yang disediakan. Ini melibatkan penggunaan metode pengujian yang akurat, peralatan yang mutakhir, serta tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas.

**Evaluasi Kinerja:** UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil kerjanya secara berkala. Evaluasi ini dapat melibatkan peninjauan internal dan eksternal, serta pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur.

**Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengujian dan sertifikasi mutu barang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat mengadakan forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan yang diberikan.

**Penanganan Keluhan:** UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan dari masyarakat. Keluhan harus ditindaklanjuti dengan cepat dan solusi yang memadai harus diberikan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi.

**Akuntabilitas Internal:** UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu memastikan bahwa ada sistem akuntabilitas internal yang kuat di

tempat nya. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengawasan internal yang ketat terhadap proses pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ini akan membantu memastikan bahwa barang-barang yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan melindungi kepentingan konsumen

#### **8. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Pelatihan Koperasi.**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi mengacu pada usaha untuk memperbaiki transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pengembangan koperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UPTD tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat terkait pelatihan koperasi.

Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi:

**Transparansi:** UPTD Pelatihan Koperasi harus menerapkan prinsip transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Ini meliputi menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program pelatihan yang ditawarkan, persyaratan pendaftaran, biaya yang terkait, jadwal, dan evaluasi hasil pelatihan.

**Standar Kualitas:** UPTD Pelatihan Koperasi harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa materi pelatihan relevan dan up-to-date, fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta melibatkan instruktur yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang koperasi.

**Evaluasi Kinerja:** UPTD Pelatihan Koperasi perlu melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur efektivitas pelatihan yang

diselenggarakan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kepuasan peserta, tingkat kelulusan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta dampak pelatihan terhadap pengembangan koperasi di masyarakat.

**Partisipasi Masyarakat:** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan koperasi dapat meningkatkan akuntabilitas. UPTD Pelatihan Koperasi dapat melibatkan komunitas koperasi, asosiasi, atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan, diskusi, dan penilaian program pelatihan.

**Pengawasan Internal:** UPTD Pelatihan Koperasi harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan pelatihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran.

**Komunikasi dan Informasi:** UPTD Pelatihan Koperasi harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, baik itu melalui media sosial, situs web, atau pusat informasi. Informasi mengenai program pelatihan, proses pendaftaran, dan hasil evaluasi harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat

Dengan mengimplementasikan sasaran-sasaran ini, Disperindagkop dapat mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik yang berdampak positif pada sektor industri, perdagangan, dan koperasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan strategi dan program-program ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim. Dampak positif yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang tersedia di pasar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 17. tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 -2026

| TUJUAN/ SASARAN  | INDIKATOR   | DATA AWAL 2022 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | KONDISI AKHIR |
|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| <b>Tujuan 1</b><br>Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri     | LPE Sektor Industri Pengolahan (%)  | 3,58           | 6      | 6      | 6      | 6      | 6             |
| <b>Sasaran 1</b><br>Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan           | Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%) | 6,84           | 10,06  | 10,06  | 10,43  | 10,8   | 11            |
| <b>Tujuan 2</b><br>Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan  | Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)       | 18,83          | 18,77  | 20     | 22     | 25     | 25            |
| <b>Sasaran 2</b><br>Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim    | Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)                               | 534,53         | 566,60 | 566,60 | 600,60 | 636,64 | 636,64        |
| <b>Sasaran 3</b><br>Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen        | Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)  | 55             | 60     | 60     | 62     | 64     | 64            |
| <b>TUJUAN 3</b><br>Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat.          | Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)                                  | 0              | 2      | 2      | 6      | 7      | 7%            |
|  | Inflasi pangan bergejolak (%)   | 5,35           | 4,5    | 4,5    | 4,4    | 4,3    | 4,3           |
| <b>Sasaran 4</b><br>Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM | Pertumbuhan Omzet UKM   | 0,26           | 5,80   | 5,80   | 6,3    | 6,8    | 6,8           |

| TUJUAN/ SASARAN  | INDIKATOR  | DATA AWAL 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | KONDISI AKHIR |
|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|  | Pertumbuhan Omzet Koperasi   | 17,91          | 19,00 | 19,00 | 21    | 23,0  | 23,0          |
| Sasaran 5<br>Peningkatan efisiensi<br>Distribusi Perdagangan   | Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%) | 1,17           | 1,16  | 1,15  | 1,15  | 1,15  | 1,15          |
|  |  |                |       |       |       |       |               |
| Tujuan 4<br>Mewujudkan birokrasipemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas        | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                                  | 78,1           | 78,25 | 78,50 | 79,50 | 80,01 | 80,01         |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah                                   | 84,41          | 84,60 | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,00         |
| Sasaran 6<br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop                            | Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop                                     | 72,8           | 75    | 75,5  | 77,5  | 80,00 | 80,00         |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop                                      | 88,01          | 85,00 | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,00         |
|  | Galeri UKM (%)   | 30             | 100   | 100   | -     | -     | 100           |
|  |  |                |       |       |       |       |               |
| Sasaran 7<br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)                              | Skor Kepuasan Masyarakat   | 95,44          | 95,5  | 95,6  | 95,7  | 96    | 96            |
| Sasaran 8<br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi ) | Skor Kepuasan Masyarakat   | 0              | 85    | 86    | 87    | 88    | 88            |

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

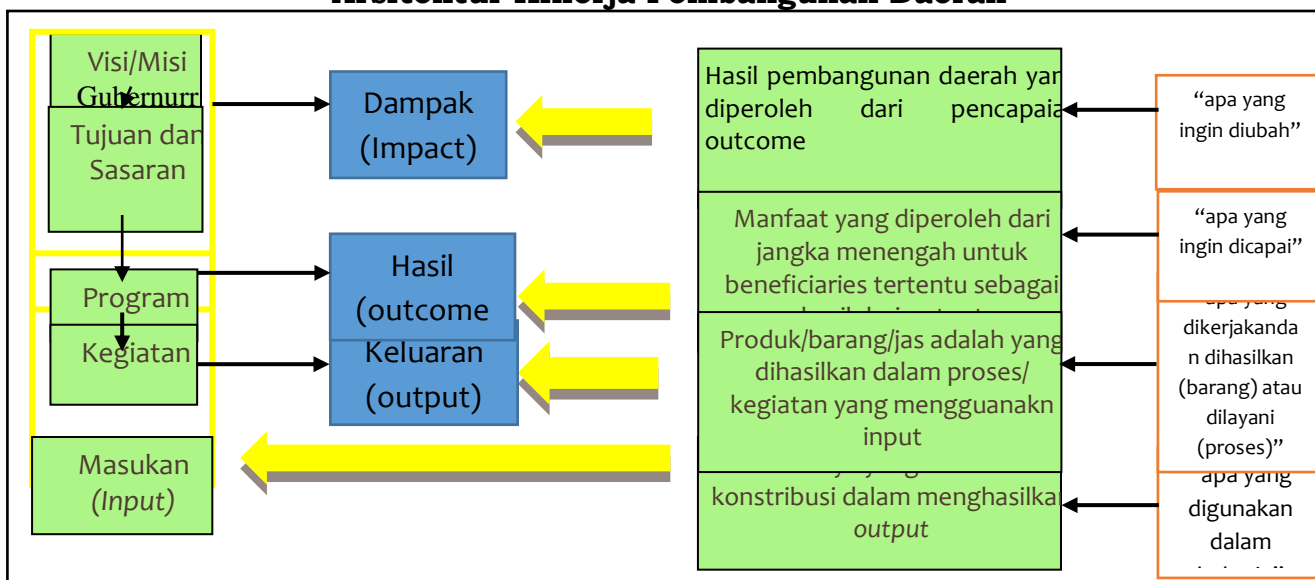
### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

RPD Provinsi Kalimantan Timur , maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Melakukan Perubahan dari Tujuan hingga Arah Kebijakan Agar Selaras dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur,

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim mengikuti pola sebagai berikut:

**Gambar 5**

**Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah**



Dalam rangka Rangka Perubahan tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim menetapkan 3 (tiga ) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2024-2026, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



**Tabel 18.**

**Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas  
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan  
Timur tahun 2024 – 2026**

| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>   | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>   |
|---|--|---|---|
| TUJUAN 1:<br>Terwujudnya<br>diversifikasi<br>ekonomi Sektor<br>Industri | Sasaran 1.1:<br>Peningkatan<br>Kontribusi<br>industri<br>pengolahan. | Mengembangkan Wilayah Pusat<br>Pertumbuhan Industri, Kawasan<br>Peruntukan Industri, Kawasan<br>Industri dan Sentra Industri Kecil<br>Menengah                            | 1. Membangun Kawasan Industri<br>dan Sentra Industri Kecil Menengah.<br>2. Menerapkan industri hijau yang<br>ramah lingkungan.<br>3. Meningkatkan kapasitas<br>kelembagaan dalam membangun<br>dan mengelola kawasan   |
|   |  | Meningkatkan penyediaan sarana<br>dan prasarana industry  | 1. Mendorong pembangunan<br>infrastruktur industri dan<br>infrastruktur penunjang<br>2. Fasilitasi industri kecil menengah<br>yang menerapkan SNI, spesifikasi<br>teknis dan/atau pedoman tata cara<br>yang diberlakukan secara wajib<br>3. Pengembangan pengolahan CPO<br>4. Pengembangan Produk Rotan<br>5. Pengembangan hilirisasi industri  |
|   |  | Meningkatkan penguasaan<br>teknologi, kualitas sumber daya<br>manusia industri, pemanfaatan<br>sumber daya alam, inovasi dan<br>kreativitas serta dukungan<br>pembiayaan. | 1. Meningkatkan kompetensi<br>sumber daya manusia industri<br>melalui pendidikan vokasi,<br>pelatihan, sertifikasi dan<br>pemagangan.<br>2. Mendorong pengembangan,<br>peningkatan, penguasaan dan<br>pengoptimalan pemanfaatan<br>teknologi industri.<br>3. Mendorong pengembangan dan<br>peningkatan kreativitas inovasi<br>dalam membangun industri<br>4. Dukungan penyediaan sumber<br>pembiayaan usaha industri. |
|   |  | Meningkatkan kerjasama sektor<br>Industri.  | Meningkatkan kerjasama yang<br>mendukung pengembangan<br>industri, meliputi standardisasi;<br>penelitian, pengembangan dan<br>penerapan teknologi; peningkatan<br>kompetensi sumber daya manusia<br>industri; pengembangan<br>perwilayahan industri; promosi dan<br>pemasaran; pengelolaan sumber<br>daya alam; inovasi dan kreativitas;<br>prasarana dan sarana industri   |

| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>  | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
|--|---|--|--|
|  |   | Mewujudkan kebijakan afirmatif dan pemberdayaan industri kecil menengah.                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan upaya diversifikasi produk</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri unggulan</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi internal IKM</li> <li>4. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM</li> <li>5. Pemberian fasilitas kepada industri kecil menengah</li> </ol> |
|  |   | Menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung jawab.                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian</li> <li>2. Memberikan kemudahan perizinan berusaha</li> <li>3. Memperkuat basis data sektor industri yang terintegrasi</li> <li>4. Mendorong penyusunan regulasi yang menjamin pasokan bahan baku</li> </ol>                             |
|  |   |  |  |
| Tujuan 2:<br>Terwujudnya<br>Diversifikasi<br>Ekonomi sektor<br>Perdagangan | Sasaran 2.2:<br>Perdagangan,<br>daya saing<br>Komoditi dan<br>ekspor Kaltim | Peningkatan Daya Saing Komoditas Non Migas dan Batubara Di Pasar Internasional           | Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah  |
|  |   | Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri  | Penguatan pendampingan UKM dan promosi produk melalui kurasi   |
|  |   | Meningkatkan kerjasama dengan daerah lain terkait peningkatan daya saing komoditi ekspor | Melakukan misi dagang dengan daerah produsen   |
|  |   | Peningkatan SDM UKM untuk tumbuh menjadi Eksporir  | 1. Peningkatan Daya Saing UKM  |
|  |   | Meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha ekspor dan potensial ekspor                     | Mempersiapkan Skema Rancangan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor  |
|  |   | Peningkatan Sistem Distribusi Yang Efisien   | membangun sinergitas Provinsi dengan Kab/Kota Pusat distribusi perdagangan   |
|  |   | Meningkatkan wawasan terkait peluang ekspor bagi pelaku usaha                            | Peningkatan Sosialisasi bagi pelaku usaha  |
|  |   | Meningkatkan promosi citra produk unggulan kaltim dalam dan luar negeri                  | Peningkatan Promosi Perdagangan  |
|  | Sasaran 2.3:<br>Peningkatan<br>nilai indeks<br>keberdayaan                  | peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan/ atau Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan       | Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen   |

| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>  |
|--|--|--|--|
|  | konsumen   |  | Pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas; |
| TUJUAN 3:<br>Meningkatkannya keberdayaan ekonomi masyarakat. | Sasaran 3.4:<br>Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM | Revitalisasi Pembinaan dan Pengelolaan Koperasi dan UKM  | 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM  |
|  |  | Pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk perluasan akses pemasaran secara modern                   | Peningkatan daya saing UKM diarahkan pada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui melalui fasilitasi, dorongan pengembangan kreasi/inovasi, pengembangan produksi, peningkatan pasar dan akses informasi dan pemanfaatan teknologi                   |
|  |  |  | Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM   |
|  |  | Pemberian Pelatihan kepada SDM Koperasi dan UKM  | Peningkatan SDM Koperasi dan UKM   |
|  |  | Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan               | Pendampingan dan Dukungan Modal  |
|  | Sasaran 3.5 Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi.                 | Melakukan monitoring dan pemantauan ke pasar   | Peningkatan koordinasi pemantauan harga kebutuhan bahan pokok di tingkat Kab/ kota se- kaltim  |
|  |  | Menjalin Kerjasama dengan stakeholder terkait yang menangani distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting    | Membangun Sinergitas Dan Harmonisasi Dengan Seluruh Stakeholder Terkait  |
|  |  | Menjalin Kerjasama dengan daerah produsen dalam rangka perluasan pasar dan pemenuhan barang pokok dan barang penting | Membangun sinergitas dan harmonisasi dengan seluruh stakeholder terkait penanganan distribusi barang kebutuhan pokok   |
|  |  | Mendorong pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah  | Memberikan subsidi barang kebutuhan pokok pada kegiatan operasi pasar  |
|  |  | mendorong terbentuk Pusat Distribusi (Food Station)  | Meningkatkan Kerjasama antar Dinas Perindagkop Kab/kota dan Dinas Lintas (Dinas Pangan tanaman Pangan dan Holtikultura)  |

| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|---|--|--|--|
| <b>Tujuan 4:<br/>Mewujudkan<br/>Disperindagkop<br/>yang memiliki<br/>Birokrasi<br/>pelayanan<br/>publik<br/>berkualitas</b> | Sasaran 4. 6:<br>Peningkatan<br>Nilai Akip<br>disperindagkop<br>& UKM  | Peningkatan efisiensi dan kualitas<br>ketatalaksanaan      | Penerapan reformasi birokrasi dan<br>Core value ASN  |
|   | Sasaran 4.7<br>Meningkatnya<br>akuntabilitas<br>kinerja dan<br>layanan publik<br>(UPTD BPSMB)                                      | - Peningkatan Transparansi<br>- Penguatan Sistem Pelaporan | - meningkatkan transparansi dalam<br>pelaksanaan tugas dan tanggung<br>jawab UPTD BPSMB.<br>- Bangun sistem pelaporan yang<br>efektif dan terintegrasi untuk<br>mengumpulkan data kinerja secara<br>berkala. |
|   | Sasaran 4.8<br>Meningkatnya<br>akuntabilitas<br>kinerja dan<br>layanan publik<br>Disperindagkop<br>(UPTD<br>Pelatihan<br>Koperasi) | - Peningkatan Transparansi<br>- Penguatan Sistem Pelaporan | - meningkatkan transparansi dalam<br>pelaksanaan tugas dan tanggung<br>jawab UPTD Pelkop<br>- Bangun sistem pelaporan yang<br>efektif dan terintegrasi untuk<br>mengumpulkan data kinerja secara<br>berkala. |

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu Tiga tahun (2024-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis DISPERINDAGKOP dan UKM Kalimantan Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan Perubahan RPD Kalimantan Timur 2024-2026 yang sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD.

### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini :

#### **A. Program DISPERINDAGKOP dan UKM Kaltim**

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja prioritas yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, yaitu:

#### **I. Sumber Dana Desentralisasi**

##### **a. Urusan Wajib Koperasi & UKM**

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Program Pengembangan Umkm
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan UKM
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**b. Urusan Pilihan Perindustrian**

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

**c. Urusan Pilihan Perdagangan**

1. Program Pengembangan Ekspor
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan.
3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam negeri Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang.
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

**II. Sumber Dana Dekonsentrasi**

**a. Koperasi & UKM**

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kaltim

**b. Industri**

1. Program Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri
2. Program Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

**a. Perdagangan**

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Kegiatan DISPERINDAGKOP dan UKM Kaltim

Untuk merealisasikan program kerja prioritas maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Gubernur

Kalimantan Timur. Kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim meliputi:

## **I. Sumber Dana Desentralisasi**

### **a. Urusan Wajib Koperasi dan UKM**

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kegiatan Kordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.
2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
3. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK).
4. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Pelatihan KUMKM.
5. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
11. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

## **b. Urusan Pilihan Perindustrian**

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.
3. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

## **c. Urusan Pilihan Perdagangan**

1. Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kotaKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2. Kegiatan: Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi Yang Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal ImporKegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3. Kegiatan: Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam NegeriKegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
4. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah ProvinsiKegiatan Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran.
5. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan.
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota.
7. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/Kota.
8. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kegiatan Pengendalian usaha Perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar.



## **II. Sumber Dana Dekonsentrasi**

### **a. Koperasi & UKM**

- Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### **B. Industri**

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

### **C. Perdagangan**

1. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri.
2. Kegiatan Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang.
3. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

#### **6.2 Pendanaan Indikatif**

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2024 s/d 2026 tercantum pada lampiran Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Sasaran, dan Pendanaan Indikati

**Tabel 19 Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Indikatif**

| TUJUAN  | SASARAN  | KODE            | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |           |                |           |                |           |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi       |
|---|--|-----------------|--|--|---|---|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--|---|--------------|
|   |  |                 |  |  |   | 2023  |                | 2024      |                | 2025      |                | 2026      |                |  |   |              |
|   |  |                 |  |  |   | Target  | (Rp)           | Target    | (Rp)           | Target    | (Rp)           | Target    | (Rp)           |  |   |              |
| (1)   | (2)  | (3)             | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)            | (9)       | (10)           | (11)      | (12)           | (13)      | (14)           | (15)   | (16)  | (17)         |
|   |  |                 | RENCANA PAGU DINAS dan UPTD  |  |   |   | 92.850.847.240 |           | 64.000.000.000 |           | 95.900.000.000 |           | 97.800.000.000 |  |   |              |
|   |  |                 | RENCANA PAGU DINAS   |  |   |   |                |           | 52.950.000.000 |           | 83.950.000.000 |           | 84.950.000.000 |  |   |              |
| Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri | Sasaran 1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan |                 | LPE Sektor Industri Pengolahan (%)   | 3,58   | 6   |   |                | 6         |                | 6         |                | 6         |                | 6  |   |              |
|   |  |                 | Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)  | 6,84   | 10,06   |   |                | 10        |                | 10,43     |                | 11        |                | 11   |   |              |
|   |  | 3.31.02         | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri   | Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)   | 4,76  | 4,15  | 1.958.039.000  | 5,20      | 2.820.000.000  | 5,56      | 13.020.000.000 | 5,92      | 12.920.000.000 | 5,92   | Bidang Industri                             |              |
|   |  | 3.31.02.1.01    | Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi   | Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi (Dok)   | 0   | 5   | 1.958.039.000  | 5         | 2.820.000.000  | 5         | 13.020.000.000 | 5         | 12.920.000.000 | 15   | Bidang Industri                             |              |
|   |  | 3.31.02.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi  | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri  | 0   |   |                | 1 Dokumen | 150.000.000    | 1 Dokumen | 150.000.000    | 1 Dokumen | 150.000.000    | 1 Dokumen  | Bidang Industri                             | 10 kab/ Kota |
|   |  | 3.31.02.1.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 3 Dokumen                                       | 3 Dokumen                                     | 295.608.500    | 1 Dokumen | 100.000.000    | 1 Dokumen | 100.000.000    | 1 Dokumen | 100.000.000    | 1 Dokumen  | Bidang Industri                             | 10 kab/ Kota |
|   |  | 3.31.02.1.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 112.890.000    | 1 Dokumen | 120.000.000    | 1 Dokumen | 120.000.000    | 1 Dokumen | 120.000.000    | 1 Dokumen  | Bidang Industri                             | 10 kab/ Kota |
|   |  | 3.31.02.1.01.04 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | 0   | 0   | 0              | 1 Dokumen | 100.000.000    | 1 Dokumen | 10.200.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000.000 | 1 Dokumen  | Bidang Industri                             | 10 kab/ Kota |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                      | PROGRAM DAN KEGIATAN  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi       |
|--------|---------|---------------------------|---|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------|
|        |         |                           |   |  |   | 2023  |               | 2024          |               | 2025          |               | 2026          |               |   |  |              |
|        |         |                           |   |  |   | Target  | (Rp)          | Target        | (Rp)          | Target        | (Rp)          | Target        | (Rp)          |   |  |              |
| (1)    | (2)     | (3)                       | (4)   | (5)  | (6)   | (7)   | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          | (15)  | (16)   | (17)         |
|        |         | 3.31.0<br>2.1.01<br>.05   | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | 7 Dokumen                                       | 7 Dokumen                                     | 1.413.148.500 | 7 Dokumen     | 2.000.000.000 | 7 Dokumen     | 2.100.000.000 | 7 Dokumen     | 2.200.000.000 | 7 Dokumen   | Bidang Industri                              | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.31.0<br>2.1.01<br>.06   | Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri   | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 136.392.000   | 1 Dokumen     | 150.000.000   | 1 Dokumen     | 150.000.000   | 1 Dokumen     | 150.000.000   | 3 Dokumen   | Bidang Industri                              | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.31.0<br>2.1.01<br>.0007 | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri   | Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri   | 0   |   |               | 1 Dokumen     | 60.000.000    | 1 Dokumen     | 60.000.000    | 1 Dokumen     | 60.000.000    | 3 Dokumen   | Bidang Industri                              | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.31.0<br>2.1.01<br>.0008 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri   | Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri   | 0   |   |               | 1 rekomendasi | 60.000.000    | 1 rekomendasi | 60.000.000    | 1 rekomendasi | 60.000.000    | 3 Rekomendasi   | Bidang Industri                              | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.31.0<br>2.1.01<br>.0009 | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri  | Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri   | 0   |   |               | 1 rekomendasi | 80.000.000    | 1 rekomendasi | 80.000.000    | 1 rekomendasi | 80.000.000    | 3 Rekomendasi   | Bidang Industri                              | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.31.0<br>3               | Program Pengendalian Izin Usaha Industri  | Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri   | 5%  | 5%"   | 670.858.000   | 5%            | 680.000.000   | 0,1           | 690.000.000   | 0,15          | 700.000.000   | 15%   | Bidang Industri                              |              |
|        |         | 3.31.0<br>3.1.01          | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Presentase jumlah hasil pemantauan (IKK ouput)   | 24%   | 24%   | 670.858.000   | 25            | 680.000.000   | 25,5          | 690.000.000   | 26            | 700.000.000   | 26  | Bidang Industri                              |              |
|        |         | 3.31.0<br>3.1.01<br>.01   | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan | 3 Dokumen                                       | 3 Dokumen                                     | 197.872.000   | 3 Dokumen     | 200.000.000   | 3 Dokumen     | 200.000.000   | 3 Dokumen     | 200.000.000   | 3 Dokumen   | Bidang Industri                              | 10 kab/ Kota |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |               |                    |               |                    |               |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17) |
|--------|---------|-------------------------|---|---|---|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--|---|-------------|
|        |         |                         |   |   |   | 2023  |                    | 2024          |                    | 2025          |                    | 2026          |                    |  |   |             |
|        |         |                         |   |   |   | Target  | (Rp)               | Target        | (Rp)               | Target        | (Rp)               | Target        | (Rp)               |  |   |             |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                | (9)           | (10)               | (11)          | (12)               | (13)          | (14)               | (15)   | (16)  | (17)        |
|        |         |                         | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   | 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi |   |   |                    |               |                    |               |                    |               |                    |  |   |             |
|        |         | 3.31.0<br>3.1.01<br>.02 | <b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi    | 2 Dokumen                                       | 2 Dokumen                                     | 472.986.000        | 2 Dokumen     | 480.000.000        | 2 Dokumen     | 490.000.000        | 2 Dokumen     | 500.000.000        | 2 Dokumen  | Bidang Industri                                   | 10 kab/Kota |
|        |         | 3.31.0<br>4             | <b>Program</b> Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional   | <b>Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas</b>  | 17,04%  | 18,51   | <b>454.001.000</b> | <b>18,69%</b> | <b>500.000.000</b> | <b>0,1902</b> | <b>500.000.000</b> | <b>0,1958</b> | <b>500.000.000</b> | <b>19,58%</b>  | <b>Bidang Industri</b>                            |             |
|        |         | 3.31.0<br>4.1.01        | <b>Kegiatan</b> Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  | Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS   | 5 Industri                                      | 5 Industri                                    | 454.001.000        | 3 industri    | 500.000.000        | 3 industri    | 500.000.000        | 3 industri    | 500.000.000        | 3 industri   | Bidang Industri                                   |             |
|        |         | 3.31.0<br>4.1.01<br>.01 | <b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                      | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 117.006.500        | 1 Dokumen     | 150.000.000        | 1 Dokumen     | 150.000.000        | 1 Dokumen     | 150.000.000        | 1 Dokumen  | Bidang Industri                                   | 10 kab/Kota |
|        |         | 3.31.0<br>4.1.01<br>.02 | <b>Sub Kegiatan</b> Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas   | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas  | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                     | 96.994.500         | 1 Dokumen     | 100.000.000        | 1 Dokumen     | 100.000.000        | 1 Dokumen     | 100.000.000        | 1 Dokumen  | Bidang Industri                                   | 10 kab/Kota |
|        |         | 3.31.0<br>4.1.01<br>.03 | <b>Sub Kegiatan</b> Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi  | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas  | 10 Dokumen                                      | 10 Dokumen                                    | 240.000.000        | 2 Dokumen     | 250.000.000        | 2 Dokumen     | 250.000.000        | 2 Dokumen     | 250.000.000        | 2 Dokumen  | Bidang Industri                                   | 10 kab/Kota |

| TUJUAN   | SASARAN   | KODE            | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                 |               |                 |               |                 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)  |
|--|---|-----------------|--|--|---|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|---|--------------|
|  |   |                 |  |  |   | 2023  |               | 2024            |               | 2025            |               | 2026            |               |  |   |              |
|  |   |                 |  |  |   | Target  | (Rp)          | Target          | (Rp)          | Target          | (Rp)          | Target          | (Rp)          |  |   |              |
| (1)  | (2)   | (3)             | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)           | (9)             | (10)          | (11)            | (12)          | (13)            | (14)          | (15)   | (16)  | (17)         |
|  |   |                 | Dalam Penyampaian Data ke SIIINas  |  |   |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |  |   |              |
| Tujuan2 Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan |   |                 |  | Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)  | 18,83   | 18,77   |               | 20,00           |               | 22              |               | 25              |               | 25,00  |   |              |
|  | Sasaran 2 Peningkatan daya saing komoditi dan ekspor Kaltim |                 |  | Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)                          | 534,53  | 566,604                                       |               | 566,60          |               | 600,601         |               | 636,636         |               | 636,64   |   |              |
|  |   | 3.30.05         | Program Pengembangan Ekspor  | Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru                | 64 jenis produk                                 | 64 jenis produk                               | 1.671.425.175 | 67 jenis produk | 1.570.000.000 | 70 Jenis produk | 1.895.509.000 | 73 Jenis produk | 2.085.059.900 | 73 Jenis   | Bid Perd  |              |
|  |   | 3.30.05.1.01    | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir                    | 0   |   | 1.671.425.175 | 10 Pelaku Usaha | 1.570.000.000 | 10 Pelaku Usaha | 1.895.509.000 | 10 Pelaku Usaha | 2.085.059.900 | 30 pelaku usaha  | Bid Perd  |              |
|  |   | 3.30.05.1.01.01 | Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang                     | 0   |   | 0             | 3 Pelaku Usaha  | 700.000.000   | 3 Pelaku Usaha  | 726.569.000   | 4 Pelaku Usaha  | 769.225.900   | 10 Pelaku usaha  | Bid Perd  | 10 kab/ Kota |
|  |   | 3.30.05.1.01.02 | Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal  | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal         | 0   |   | 0             | 4 Pelaku Usaha  | 200.000.000   | 4 Pelaku Usaha  | 298.969.000   | 4 Pelaku Usaha  | 328.865.900   | 12 pelaku usaha  | Bid Perd  | 10 kab/ Kota |
|  |   | 3.30.05.1.01.03 | Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan   | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 0   |   | 1.309.981.875 | 5 Prelaku Usaha | 260.000.000   | 5 Prelaku Usaha | 306.515.000   | 5 Prelaku Usaha | 337.166.500   | 15 pelaku usaha  | Bid Perd  | 10 kab/ Kota |
|  |   | 3.30.05.1.01.04 | Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor   | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi       | 0   |   | 0             | 20 Produk       | 410.000.000   | 20 Produk       | 563.456.000   | 20 Produk       | 649.801.600   | 30 pelaku usaha  | Bid Perd  | 10 kab/ Kota |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                        | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                              | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                |                    |                |                    |                 |                    | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi       |
|--------|---------|-----------------------------|--|---|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|--|--------------|
|        |         |                             |  |   |   | 2023  |                    | 2024           |                    | 2025           |                    | 2026            |                    |   |  |              |
|        |         |                             |  |   |   | Target  | (Rp)               | Target         | (Rp)               | Target         | (Rp)               | Target          | (Rp)               |   |  |              |
| (1)    | (2)     | (3)                         | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                | (9)            | (10)               | (11)           | (12)               | (13)            | (14)               | (15)  | (16)   | (17)         |
|        |         | 3.30.0<br>5.1.01<br>.05     | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor   | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina  | 50  |   | 361.443.300        | 0              | -                  | 0              | -                  | 20 Pelaku Usaha | -                  | 60 pelaku usah  | Bid Perd                                     | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.30.0<br>2                 | <b>Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan</b>  | <b>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)</b>   | 100   | 0   | <b>202.398.600</b> | 100            | <b>406.798.600</b> | 100            | <b>648.157.600</b> | 100             | <b>731.789.120</b> | <b>100</b>  | Bid Perd                                     |              |
|        |         |                             |  | <b>persentase surat rekomendasi yang tepat waktu</b>  | 100   | 0   |                    | 100            |                    | 100            |                    | 100             |                    | <b>100</b>  | Bid Perd                                     |              |
|        |         |                             |  | <b>persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga</b>  | 70%   | 0   |                    | 80%            |                    | 0,85           |                    | 0,9             |                    | <b>90</b>   | Bid PKPB                                     |              |
|        |         | 3.30.0<br>2<br>.1.03        | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar  | jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)   | 0   | 0   | -                  | 100            | 250.000.000        | 100            | 280.000.000        | 100             | 290.000.000        | 100%  | Bid Perd                                     |              |
|        |         |                             |  | jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan  |   | 0   |                    | 9 pelaku usaha |                    | 9 pelaku usaha |                    | 9 pelaku usaha  |                    | 27 pelaku usaha   | Bid PKPB                                     |              |
|        |         | 3.30.0<br>2<br>.1.03.<br>01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission | 0   | 0   | 0                  | 10 Dokumen     | 100.000.000        | 10 Dokumen     | 130.000.000        | 10 Dokumen      | 140.000.000        | 30 Dokumen  | Bid Perd                                     | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.30.0<br>2<br>.1.03.<br>03 | pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya  | jumlah laporan hasil pengawasan bahan berbahaya   | 0   | 0   | 0                  | 3 Laporan      | 150.000.000        | 3 Laporan      | 150.000.000        | 3 Laporan       | 150.000.000        | 9 Laporan   | Bid PKPB                                     |              |
|        |         | 3.30.0<br>2<br>.1.04        | Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)               | Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA   | 150 eksportir                                   | 260 Eksp ortir                                | 202.398.600        | 260 Eksportir  | 156.798.600        | 265 Eksportir  | 368.157.600        | 270 Eksportir   | 441.789.120        | 270 Eksportir   | Bid Perd                                     |              |
|        |         | 3.30.0<br>2<br>.1.04.<br>01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA  | Jumlah SKA yang diterbitkan   | 3814  | 3500  | 202.398.600        | 3600 Dok       | 156.798.600        | 4000 Dok       | 368.157.600        | 4100 Dok        | 441.789.120        | 11700 Dokumen   | Bid Perd                                     | 10 kab/ Kota |

| TUJUAN | SASARAN | KODE            | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |           |               |           |               |           |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi       |
|--------|---------|-----------------|--|--|---|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---|--|--------------|
|        |         |                 |  |  |   | 2023  |               | 2024      |               | 2025      |               | 2026      |               |   |  |              |
|        |         |                 |  |  |   | Target  | (Rp)          | Target    | (Rp)          | Target    | (Rp)          | Target    | (Rp)          |   |  |              |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)           | (9)       | (10)          | (11)      | (12)          | (13)      | (14)          | (15)  | (16)   | (17)         |
|        |         | 3.30.07         | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                 | Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri  | 50%   | 60%   | 681.397.860   | 75%       | 1.078.201.400 | 0,9       | 988.785.000   | 1         | 1.150.380.000 | 100%  | Bid Perd                                     |              |
|        |         | 3.30.07.1.01    | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri  | Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output)   | 32%   | 0   | 0             | 25,0      | 278.384.300   | 33,33     | 336.000.000   | 41,67     | 420.000.000   | 41,7  | Bid Perd                                     |              |
|        |         | 3.30.07.1.01.01 | Sub KegiatanFasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi    | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri       | 0   | 0   | 0             | 6         | 278.384.300   | 8         | 336.000.000   | 10,00     | 420.000.000   | 24  | Bid Perd                                     | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.30.07.1.02    | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang (IKK OUTPUT)  | 34,51   | 0   | 681.397.860   | 13,51     | 349.817.100   | 23,4375   | 172.785.000   | 45,45     | 230.380.000   | 45,45   | Bid Perd                                     |              |
|        |         | 3.30.07.1.02.01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 0   | 14  | 681.397.860   | 10        | 349.817.100   | 15        | 172.785.000   | 20        | 230.380.000   | 45  | Bid Perd                                     | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.30.07.1.03    | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                      | jumlah yang di sosialisasi   | 0   | 0   | 0             | 800 orang | 450.000.000   | 800 orang | 480.000.000   | 800 orang | 500.000.000   | 2400 orang  | Bid Perd                                     |              |
|        |         | 3.30.07.1.03.02 | Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                  | Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri  | 0   | 0   | 0             | 7 Laporan | 450.000.000   | 7 Laporan | 480.000.000   | 7 Laporan | 500.000.000   | 21 laporan  | Bid Perd                                     | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.30.06         | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                       | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME)   | 76,09   | 0   | 4.668.554.700 | 77        | 5.000.000.000 | 79        | 8.660.171.780 | 80        | 9.566.188.958 | 80  | Bid PKPB                                     |              |
|        |         | 3.30.06.1.01    | Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota          | jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi   | 1151  | 0   | 4.104.974.700 | 1000      | 3.669.145.260 | 1000      | 5.477.695.520 | 1000      | 6.025.465.072 | 3.000   | Bid PKPB                                     |              |

| TUJUAN   | SASARAN   | KODE                      | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                 |                |                 |                |                 |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)        |
|--|---|---------------------------|--|---|---|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|---|--------------------|
|  |   |                           |  |   |   | 2023  |               | 2024            |                | 2025            |                | 2026            |                |  |   |                    |
|  |   |                           |  |   |   | Target  | (Rp)          | Target          | (Rp)           | Target          | (Rp)           | Target          | (Rp)           |  |   |                    |
| (1)  | (2)   | (3)                       | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)           | (9)             | (10)           | (11)            | (12)           | (13)            | (14)           | (15)   | (16)  | (17)               |
|  |   | 3.30.0<br>6.1.01<br>.01   | Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen   | Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (Pelayanan Pengaduan, Operasional BPSK, Survey IKK)   | 3 BPSK  | 3<br>BPS<br>K                                 | 865.877.400   | 3 BPSK          | 1.819.145.260  | 3 BPSK          | 3.442.863.600  | 3 BPSK          | 3.787.149.960  | 9 BPSK   | Bid PKPB  | 10<br>kab/<br>Kota |
|  |   | 3.30.0<br>6.1.01<br>.02   | Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen   | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (Forum, Pembentukan LPKSM, Peningkatan Kompetensi SDM Perlindungan Konsumen, Evaluasi LPKSM) | 1<br>LPKSM                                      | 0   | 0             | 1 LPKSM         | 450.000.000    | 1 LPKSM         | 489.748.600    | 1 LPKSM         | 538.723.460    | 3 kali   | Bid PKPB  | 10<br>kab/<br>Kota |
|  |   | 3.30.0<br>6.1.01<br>.03   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen   | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani  | 6<br>Pengaduan                                  | 20<br>pengaduan                               | 3.239.097.300 | 20<br>pengaduan | 1.400.000.000  | 25<br>pengaduan | 1.545.083.320  | 30<br>pengaduan | 1.699.591.652  | 75<br>pengaduan  | Bid PKPB  | 10<br>kab/<br>Kota |
|  |   | 3.30.0<br>6.1.03          | Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan  | 5%  | 0   | 563.580.000   | 5%              | 1.330.854.740  | 5%              | 3.182.476.260  | 5%              | 3.540.723.886  | 5%   | Bid PKPB  |                    |
|  |   | 3.30.0<br>6.1.03<br>.0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa Serta Pengawasan Tertib Niaga   | 3<br>Laporan                                    | 3<br>laporan                                  | 563.580.000   | 3 Laporan       | 665.427.370    | 3 Laporan       | 1.591.238.130  | 3 Laporan       | 1.770.361.943  | 9<br>Laporan   | Bid PKPB  | 10<br>kab/<br>Kota |
|  |   | 3.30.0<br>6.1.03<br>.0004 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga   | Jumlah Kasus yang Ditangani   | 0   | 0   | 0             | 3 kasus         | 665.427.370    | 3 kasus         | 1.591.238.130  | 3 kasus         | 1.770.361.943  | 9 kasus  | Bid PKPB  | 10<br>kab/<br>Kota |
| TUJUAN 2 :<br>Meningkat<br>nya keberdaya<br>an ekonomi masyarakat. |   |                           |  | Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)  | 0   | 0   | 0             | 2               | 49.750.650.000 | 6               | 79.866.306.312 | 7               | 83.312.864.269 | 6  | BID.<br>KOPERASI                                  |                    |
|  | Sasaran 4 :<br>Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM |                           |  | Pertumbuhan Omzet UKM   | 5,60  | 0   | 0             | 5,80            | 9.247.850.000  | 6,3             | 35.442.877.884 | 6,8             | 43.050.872.972 | 6,8  | BID.<br>KOPERASI                                  |                    |
|  |   |                           |  |   | Pertumbuhan Omzet Koperasi                      | 16%   |               |                 | 19,00          |                 | 21             |                 | 23             |  | 23,0  | BID.<br>KOPERASI   |



| TUJUAN | SASARAN | KODE            | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi       |
|--------|---------|-----------------|--|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------|
|        |         |                 |  |   |   | 2023  |               | 2024          |               | 2025          |               | 2026          |               |   |  |              |
|        |         |                 |  |   |   | Target  | (Rp)          | Target        | (Rp)          | Target        | (Rp)          | Target        | (Rp)          |   |  |              |
| (1)    | (2)     | (3)             | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          | (15)  | (16)   | (17)         |
|        |         | 2.17.03         | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  | Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat  | 15,29%  | 15  | 583.040.000   | 31%           | 1.068.670.000 | 34,55%        | 1.200.000.000 | 35,53%        | 1.500.000.000 | 35,53%  | BID. KOPERASI                                |              |
|        |         | 2.17.03.1.01    | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi   | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi   | 24%   | 50  | 583.040.000   | 54,00%        | 534.335.000   | 0,54          | 600.000.000   | 0,7524        | 750.000.000   | 75%   | BID. KOPERASI                                |              |
|        |         | 2.17.03.1.01.01 | Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi  | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Pemberian Manfaat ke Pada Anggota KUKM dan Masyarakat | 0   | 0,0   | 0             | 25 unit usaha | 534.335.000   | 30 unit usaha | 600.000.000   | 46 unit usaha | 750.000.000   | 85 unit   | BID. KOPERASI                                | 10 kab/ Kota |
|        |         |                 | kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi   |   |   |               | 20            | 534.335.000   | 20            | 600.000.000   | 20            | 750.000.000   | 20%   | BID. KOPERASI                                |              |
|        |         | 2.17.03.1.01.02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                           | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, Serta Akuntabel         | 0   | 30 unit usaha                                 | 583.040.000   | 25 unit usaha | 534.335.000   | 30 unit usaha | 600.000.000   | 46 unit usaha | 750.000.000   | 101 kop   | BID. KOPERASI                                | 10 kab/ Kota |
|        |         | 2.17.06         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI   | Persentase Koperasi Modern binaan provinsi  | 0   | 0   | 1.593.231.000 | 34%           | 1.965.315.000 | 0,66          | 2.161.846.500 | 1             | 2.378.031.150 | 100%  | BID. KOPERASI                                |              |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi       |
|--------|---------|-------------------------|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--------------|
|        |         |                         |   |   |   | 2023  |               | 2024          |               | 2025          |               | 2026          |               |   |  |              |
|        |         |                         |   |   |   | Target  | (Rp)          | Target        | (Rp)          | Target        | (Rp)          | Target        | (Rp)          |   |  |              |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)          | (15)  | (16)   | (17)         |
|        |         | 2.17.0<br>6.1.01        | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha  | 57,65   | 0   | 1.593.231.000 | 59,65         | 1.965.315.000 | 61,65         | 2.161.846.500 | 63,65         | 2.378.031.150 | 65,65   | BID. KOPERASI                                |              |
|        |         | 2.17.0<br>6.1.01<br>.01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha  | Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha  | 0   | 0   | 0             | 10 unit usaha | 1.581.095.000 | 11 unit usaha | 1.739.204.500 | 12 unit usaha | 1.913.124.950 | 33 unit usaha   | BID. KOPERASI                                | 10 kab/ Kota |
|        |         | 2.17.0<br>6.1.01<br>.02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha  | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha           | 101 unit usaha                                  | 150   | 1.593.231.000 | 25 unit usaha | 384.220.000   | 30 unit usaha | 422.642.000   | 46 unit usaha | 464.906.200   | 101 unit usaha  | BID. KOPERASI                                | 10 kab/ Kota |
|        |         | 2.17.0<br>7             | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)  | Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital   | 0,91  | 3%  | 463.700.000   | 5,00          | 1.818.165.000 | 10            | 2.042.752.000 | 15            | 2.121.328.850 | 15,00   | BID. KOPERASI                                |              |
|        |         | 2.17.0<br>7.1.01        | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                       | Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra (IKK)   | 3,85  | 0   | 463.700.000   | 7,5           | 1.818.165.000 | 7,5           | 2.042.752.000 | 7,5           | 2.121.328.850 | 7,5   | BID. KOPERASI                                |              |
|        |         | 2.17.0<br>7.1.01<br>.01 | Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (115 UKM) | 175   | 200 unit usaha                                | 463.700.000   | 115 UKM       | 598.180.000   | 125UKM        | 785.768.500   | 140 UKM       | 864.345.350   | 380   | BID. KOPERASI                                | 10 kab/ Kota |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |               |                      |               |                       |               |                       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi       |
|--------|---------|-------------------------|--|---|---|---|--------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|--|--------------|
|        |         |                         |  |   |   | 2023  |                    | 2024          |                      | 2025          |                       | 2026          |                       |   |  |              |
|        |         |                         |  |   |   | Target  | (Rp)               | Target        | (Rp)                 | Target        | (Rp)                  | Target        | (Rp)                  |   |  |              |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                | (9)           | (10)                 | (11)          | (12)                  | (13)          | (14)                  | (15)  | (16)   | (17)         |
|        |         | 2.17.0<br>7.1.01<br>.02 | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan          | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan  | 0   | 0   | 0                  | 150 Orang     | 369.985.000          | 150 Orang     | 406.983.500           | 150 Orang     | 406.983.500           | 450   | BID. KOPERASI                                | 10 kab/ Kota |
|        |         | 2.17.0<br>7.1.01<br>.05 | subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil  | Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata   |   |   | 3500 unit          | 500.000.000   | 3500 unit            | 500.000.000   | 3500 unit             | 500.000.000   | 3500 unit             | BID. KOPERASI   | 10 kab/ Kota                                 |              |
|        |         | 2.17.0<br>7.1.01<br>.08 | subkegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil  | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi   |   |   | 150 unit usaha     | 350.000.000   | 150 unit usaha       | 350.000.000   | 150 unit usaha        | 350.000.000   | 150 unit usaha        | BID. KOPERASI   | 10 kab/ Kota                                 |              |
|        |         | 2.17.0<br>8             | <b>Program Pengembangan UMKM</b>   | <b>Jumlah UKM Potensial Ekspor</b>  | <b>50</b>                                       | <b>0</b>                                      | <b>327.600.000</b> | <b>20 UKM</b> | <b>1.347.850.000</b> | <b>40 UKM</b> | <b>14.094.139.692</b> | <b>60 UKM</b> | <b>17.525.756.486</b> | <b>60 UKM</b>   | BID. KOPERASI                                |              |
|        |         | 2.17.0<br>8.1.01        | <b>Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>                   | Jumlah UKM yang di fasilitasi   | 409   | 0   | 327.600.000        | 455 UKM       | 1.347.850.000        | 455 UKM       | 14.094.139.692        | 455 UKM       | 17.525.756.486        | 1365 umk  | BID. KOPERASI                                |              |
|        |         | 2.17.0<br>8.1.01<br>.01 | <b>Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</b>                    | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 602   | 50  | 327.600.000        | 40 UKM        | 863.260.000          | 40 UKM        | 13.561.090.692        | 40 UKM        | 16.939.402.586        | 120 UKM   | BID. KOPERASI                                | 10 kab/ Kota |
|        |         | 2.17.0<br>8.1.01<br>.02 | <b>Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM</b> | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (258 UKM), Syarat Peserta UKM yang Sudah Punya Hubungan Kerja Dengan Pihak Lain       | 220   | 0   | 0                  | 258 UKM       | 484.590.000          | 258 UKM       | 533.049.000           | 258 UKM       | 586.353.900           | 774 UKM   | BID. KOPERASI                                | 10 kab/ Kota |
|        |         | 2.17.0<br>5             | <b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>  |   |   | 520   | 1.248.241.000      | -             | -                    | -             | -                     | -             | -                     | -   | -  | -            |
|        |         | 2.17.0<br>05.1.0<br>1   | <b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>               |   |   | 500   | 1.248.241.000      | -             | -                    | -             | -                     | -             | -                     | -   | -  | -            |
|        |         |                         |  |   |   |   |                    | -             | -                    | -             | -                     | -             | -                     | -   | -  | -            |

| TUJUAN | SASARAN   | KODE                      | PROGRAM DAN KEGIATAN  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |              |               |              |               |              |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi       |
|--------|---|---------------------------|---|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|--|--------------|
|        |   |                           |   |   |   | 2023  |               | 2024         |               | 2025         |               | 2026         |               |   |  |              |
|        |   |                           |   |   |   | Target  | (Rp)          | Target       | (Rp)          | Target       | (Rp)          | Target       | (Rp)          |   |  |              |
| (1)    | (2)   | (3)                       | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)           | (9)          | (10)          | (11)         | (12)          | (13)         | (14)          | (15)  | (16)   | (17)         |
|        |   |                           | Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  |   |   |   |               |              |               |              |               |              |               |   |  |              |
|        |   | 2.17.0<br>05.1.0<br>1.001 | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                    |   |   | 500   | 1.248.241.000 | -            | -             | -            | -             | -            | -             | -   | -  | -            |
|        | Sasaran 5: Peningkatan efisiensi Distribusi Perdagangan |                           |   | Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)  | 1,17  | 1,16  |               | 1,15         |               | 1,15         |               | 1,15         |               | 1   |  |              |
|        |   | 3.30.0<br>4               | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting   | Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)  | 18,47   | 0,17  | 967.510.100   | 16%          | 1.245.000.000 | 0,14         | 1.305.500.000 | 0,12         | 1.398.000.000 | 12%   | Bid Perd                                     |              |
|        |   |                           |   | Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)  | 92,27   |   |               | 85%          |               | 0,9          |               | 0,92         |               | 92  | Bid PKPB                                     |              |
|        |   | 3.30.0<br>4.1.01          | Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                             | persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag (IKK output)  | 100%  | 1   | 356.893.300   | 100%         | 275.500.000   | 100%         | 300.500.000   | 100%         | 335.000.000   | 100   | Bid Perd                                     |              |
|        |   | 3.30.0<br>4.1.01<br>.01   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | 0   | 2400 laporan                                  | 356.893.300   | 2400 laporan | 140.000.000   | 2400 laporan | 165.000.000   | 2400 laporan | 185.000.000   | 2400 laporan  | Bid Perd                                     | 10 kab/ Kota |
|        |   | 3.30.0<br>4.1.01<br>.02   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor   | 0   | 0   | 0             | 480 laporan  | 135.500.000   | 480 laporan  | 135.500.000   | 480 laporan  | 150.000.000   | 480 laporan   | Bid Perd                                     | 10 kab/ Kota |
|        |   | 3.30.0<br>4.1.02          | Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi | persentase stabilitas komoditi bapakting yang di pantau   | 73  | 80%   | 610.616.800   | 80%          | 719.500.000   | 80           | 755.000.000   | 85           | 813.000.000   | 85  | Bid Perd                                     |              |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |             |            |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)  |
|--------|---------|-------------------------|--|--|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|---|--------------|
|        |         |                         |  |  |   | 2023  |             | 2024       |             | 2025       |             | 2026       |             |  |   |              |
|        |         |                         |  |  |   | Target  | (Rp)        | Target     | (Rp)        | Target     | (Rp)        | Target     | (Rp)        |  |   |              |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)         | (9)        | (10)        | (11)       | (12)        | (13)       | (14)        | (15)   | (16)  | (17)         |
|        |         |                         | Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan  |  |   |   |             |            |             |            |             |            |             |  |   |              |
|        |         | 3.30.0<br>4.1.02<br>.01 | Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                           | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                               | 0   | 12 laporan                                    | 524.025.800 | 12 lap     | 429.500.000 | 15 lap     | 465.000.000 | 15 lap     | 487.500.000 | 36 lap   | Bid Perd  | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.30.0<br>4.1.02<br>.02 | Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi          | 0   | 10 Laporan                                    | 86.591.000  | 14 lap     | 290.000.000 | 15 lap     | 290.000.000 | 16 lap     | 325.500.000 | 48 lap   | Bid Perd  | 10 kab/ Kota |
|        |         |                         |  |  |   |   |             |            |             |            |             |            |             |  |   |              |
|        |         | 3.30.0<br>4.1.03        | kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | 0   | 0   | 0           | 10 laporan | 250.000.000 | 10 laporan | 250.000.000 | 10 laporan | 250.000.000 | 30 laporan   | Bid PKPB  |              |
|        |         | 3.30.0<br>4.1.03<br>.03 | pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (pkpb)   | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%  | 0   | 0   | 0           | 5 laporan  | 200.000.000 | 5 laporan  | 200.000.000 | 5 laporan  | 200.000.000 | 15 Laporan   | Bid PKPB  | 10 kab/ Kota |
|        |         | 3.30.0<br>4.1.03<br>.04 | koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida (pkpb)   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida   | 0   | 0   | 0           | 5 laporan  | 50.000.000  | 5 laporan  | 50.000.000  | 5 laporan  | 50.000.000  | 15 Laporan   | Bid PKPB  | 10 kab/ Kota |

| TUJUAN  | SASARAN | KODE           | PROGRAM DAN KEGIATAN  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |             |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)  |
|---|---------|----------------|---|---|---|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|--|---|--------------|
|   |         |                |   |   |   | 2023  |                | 2024       |                | 2025       |                | 2026        |                |  |   |              |
|   |         |                |   |   |   | Target  | (Rp)           | Target     | (Rp)           | Target     | (Rp)           | Target      | (Rp)           |  |   |              |
| (1)   | (2)     | (3)            | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)            | (9)        | (10)           | (11)       | (12)           | (13)        | (14)           | (15)   | (16)  | (17)         |
|   |         | 3.30.03        | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan   | Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan                      | 0   | 0   | 0              | 10         | 500.000.000    | 50         | 800.000.000    | 100         | 900.000.000    | 100  | Bid Perd  |              |
|   |         | 3.30.03.101    | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas | jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station (rapat, koordinasi, FGD)        | 0   | 0   | 0              | 6 kegiatan | 500.000.000    | 7 kegiatan | 800.000.000    | 10 kegiatan | 900.000.000    | 15 kegiatan  | Bid Perd  |              |
|   |         | 3.30.03.101.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | 0   | 0   | 0              | 3 unit     | 500.000.000    | 3 unit     | 800.000.000    | 2 unit      | 900.000.000    | 15 laporan   | Bid Perd  | 10 kab/ Kota |
| Tujuan 3 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas |         |                |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                                       | 78,1  | 78,25   |                | 78,50      | 40.502.800.000 | 79,3       | 44.423.428.428 | 80,01       | 40.261.991.297 | 80,01  | SEKRETA RIAT                                      |              |
|   |         |                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah  | 84,41   | 84,6  |                | 85,00      |                | 85,5       |                | 86          |                | 86,00  | SEKRETA RIAT                                      |              |
|   |         |                | Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop  | 72,8  | 75  |                | 75,5       |                | 77,5       |                | 80          |                | 80   |   |              |
|   |         |                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop   | 88,01   | 85  |                | 85,00      |                | 85,5       |                | 86          |                | 86,00  |   |              |
|   |         |                |   | Galeri UKM (%)  | 30  | 0   |                | 100        |                | 0          |                | 0           |                | 100  | SEKRETA RIAT                                      |              |
|   |         | 2.17.01        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan   | 88  | 88,5  | 64.257.293.690 | 88,5       | 34.000.000.000 | 88,8       | 36.993.138.428 | 89          | 32.523.465.536 |  | SEKRETA RIAT                                      |              |
|   |         |                |   | Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti                            | 0   | 100   |                | 100        |                | 100        |                | 100         |                | 100  |   |              |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |          |                |          |                |          |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|--|---|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |  |   | 2023  |                | 2024     |                | 2025     |                | 2026     |                |  |   |                |
|        |         |                         |  |  |   | Target  | (Rp)           | Target   | (Rp)           | Target   | (Rp)           | Target   | (Rp)           |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)            | (9)      | (10)           | (11)     | (12)           | (13)     | (14)           | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.01        | <b>Kegiatan</b><br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu  | 25  | 29  | 1.424.495.600  | 29       | 1.566.945.160  | 29       | 1.645.292.418  | 29       | 1.645.292.418  |  | SEKRETA RIAT                                      |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.01<br>.01 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6   | 6   | 859.696.100    | 6        | 731.715.710    | 6        | 768.301.496    | 6        | 768.301.496    | 18   | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.01<br>.02 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   | 0   | -              | 5        | 148.500.000    | 5        | 155.925.000    | 5        | 155.925.000    | 15   | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.01<br>.04 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |   | 0   | -              | 4        | 65.450.000     | 4        | 68.722.500     | 4        | 68.722.500     | 12   | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.01<br>.06 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   | 11  | 564.799.500    | 11       | 446.379.450    | 11       | 468.698.423    | 11       | 468.698.423    | 33   | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.01<br>.07 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   | 0   | -              | 3        | 174.900.000    | 3        | 183.645.000    | 3        | 183.645.000    | 9  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.02        | <b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun  | 70  | 80  | 17.022.372.350 | 75 Dok   | 16.977.480.000 | 75 Dok   | 17.048.580.350 | 75 Dok   | 17.048.580.350 | 225 dok  | SEKRETA RIAT                                      |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.02<br>.01 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 70  | 80  | 16.071.100.350 | 75 orang | 16.050.000.000 | 75 orang | 16.071.100.350 | 75 orang | 16.071.100.350 | 75   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.02<br>.02 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12  | 25  | 422.280.000    | 12 dok   | 398.360.000    | 12 dok   | 398.360.000    | 12 dok   | 398.360.000    | 36   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.02<br>.03 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4   | 0   | -              | 4        | 15.000.000     | 4        | 15.000.000     | 4        | 15.000.000     | 12   | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.02<br>.05 | <b>Sub Kegiatan</b><br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |   | 2   | 255.192.000    | 2        | 215.200.000    | 2        | 215.200.000    | 2        | 215.200.000    | 6  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|---|---|---|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |   |   | 2023  |             | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |  |   |                |
|        |         |                         |  |   |   | Target  | (Rp)        | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)         | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.02<br>.06 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan  |   | 3   | 203.120.000 | 3      | 173.520.000   | 3      | 223.520.000   | 3      | 223.520.000   | 9  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.02<br>.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD            |   | 14  | 70.680.000  | 14     | 75.400.000    | 14     | 75.400.000    | 14     | 75.400.000    | 42   | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.02<br>.08 | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  |   | 0   |             | 2      | 50.000.000    | 2      | 50.000.000    | 2      | 50.000.000    | 6  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.03        | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            | jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah (SIMDA BARANG, SIKAP, RKMBD, daftar pemeliharaan, laporan rekonsiliasi barang (2) dan laporan penatausahaan |   | 0   | 0           | 18     | 245.800.000   | 18     | 245.800.000   | 18     | 245.800.000   | 54   | SEKRETA RIAT                                      |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.03<br>.01 | SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   |   | 0   | 0           | 1      | 50.000.000    | 1      | 50.000.000    | 1      | 50.000.000    | 3  |   |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.03<br>.02 | Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |   | 0   | 0           | 1      | 50.000.000    | 1      | 50.000.000    | 1      | 50.000.000    |  |   |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.03<br>.05 | Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   | 0   | 0           | 4      | 67.200.000    | 4      | 67.200.000    | 4      | 67.200.000    | 12   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.03<br>.06 | Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   | 0   | 0           | 16     | 15.000.000    | 16     | 15.000.000    | 16     | 15.000.000    | 48   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.03<br>.07 | SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |   | 0   | 0           | 2      | 63.600.000    | 2      | 63.600.000    | 2      | 63.600.000    | 6  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.05        | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi  | 31  | 60  | 362.961.000 | 189    | 2.149.005.000 | 189    | 2.413.879.000 | 189    | 2.013.170.000 | 567  | SEKRETA RIAT                                      |                |



| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|---|---|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |   |   | 2023  |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |  |   |                |
|        |         |                         |  |   |   | Target  | (Rp)          | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.05<br>.01 | Subkegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       |   | 0   | -             | 4      | 224.800.000   | 4      | 63.600.000    | 4      | 63.600.000    | 3  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.05<br>.02 | subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |   | 3   | 362.961.000   | 3      | 286.335.000   | 3      | 350.709.000   | 0      | -             | 618  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.05<br>.03 | subkegiatan pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |   | 0   | -             | 3      | 755.950.000   | 3      | 1.056.450.000 | 3      | 1.006.450.000 | 9  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.05<br>.04 | subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        |   | 0   | -             | 4      | 61.200.000    | 4      | 61.200.000    | 4      | 61.200.000    | 3  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.05<br>.05 | subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |   | 0   | -             | 4      | 158.640.000   | 4      | 219.840.000   | 4      | 219.840.000   | 6  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.05<br>.09 | subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |   | 30  | 1.674.530.000 | 30     | 662.080.000   | 35     | 662.080.000   | 40     | 662.080.000   | 105  | SEKRETA RIAT                                      | 10 kab/ Kota   |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06        | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   | 12  | 1.356.176.690 | 12     | 3.352.630.540 | 12     | 3.196.391.800 | 12     | 3.196.391.800 | 36   | SEKRETA RIAT                                      |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.01 | subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |   | 0   | 0             | 10     | 75.020.000    | 10     | 50.020.000    | 10     | 50.020.000    | 15   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.02 | subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |   | 4   | 768.525.100   | 4      | 171.957.400   | 4      | 171.957.400   | 4      | 171.957.400   | 3  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.03 | subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |   | 0   | 0             | 4      | 53.660.000    | 4      | 20.000.000    | 4      | 20.000.000    | 3  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)            | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------------|--|---|---|---|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|--|----------------|
|        |         |                         |  |   |   | 2023  |                | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |   |  |                |
|        |         |                         |  |   |   | Target  | (Rp)           | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          |   |  |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)            | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)  | (16)   | (17)           |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.04 | subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |   | 9   | 152.627.400    | 5      | 314.562.600   | 5      | 314.562.600   | 5      | 314.562.600   | 15  | SEKRETA RIAT                                 | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.05 | subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |   | 5   | 411.753.790    | 12     | 581.125.140   | 12     | 643.546.400   | 12     | 643.546.400   | 36  | SEKRETA RIAT                                 | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.06 | subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |   | 4   | 23.270.400     | 12     | 23.270.400    | 12     | 23.270.400    | 12     | 23.270.400    | 12  | SEKRETA RIAT                                 | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.08 | subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   | 0   | 0              | 5      | 59.410.000    | 5      | 59.410.000    | 5      | 59.410.000    | 15  | SEKRETA RIAT                                 | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.09 | subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |   | 0   | 0              | 12     | 1.833.625.000 | 12     | 1.813.625.000 | 12     | 1.813.625.000 | 36  | SEKRETA RIAT                                 | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.10 | subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |   | 0   | 0              | 4      | 190.000.000   | 4      | 50.000.000    | 4      | 50.000.000    | 3   | SEKRETA RIAT                                 | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.11 | subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |   | 0   | 0              | 1      | 50.000.000    | 1      | 50.000.000    | 1      | 50.000.000    | 3   |  |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07        | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 15  | 25  | 34.524.640.330 | 100    | 1.850.703.400 | 100    | 4.601.496.000 | 100    | 339.056.000   | 300   | SEKRETA RIAT                                 |                |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |        |               |        |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|--|---|---|----------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |  |   | 2023  |                | 2024   |             | 2025   |               | 2026   |             |  |   |                |
|        |         |                         |  |  |   | Target  | (Rp)           | Target | (Rp)        | Target | (Rp)          | Target | (Rp)        |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)            | (9)    | (10)        | (11)   | (12)          | (13)   | (14)        | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.01 | subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |   | 1   | 492.610.000    | 6      | 500.000.000 | 6      | 2.262.440.000 | 0      | -           | 12   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.05 | subkegiatan Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |   | 7   | 2.248.958.200  | 3      | 100.000.000 | 3      | 2.000.000.000 | 1      | 100.000.000 | 7  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.06 | subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |   | 34  | 501.624.030    | 61     | 833.435.400 | 4      | 150.000.000   | 2      | 50.000.000  | 67   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.08 | subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  |   | 0   | 0              | 5      | 205.000.000 | 4      | 50.000.000    | 4      | 49.500.000  | 13   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.09 | subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |   | 2   | 31.281.448.100 | 1      | 500.000     | 0      | 500.000       | 0      | 500.000     | 1  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.10 | subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |   | 0   | 0              | 1      | 119.056.000 | 1      | 89.056.000    | 1      | 89.056.000  | 3  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.11 | subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |   | 0   | 0              | 1      | 92.712.000  | 1      | 49.500.000    | 1      | 50.000.000  | 3  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |

|  |  |                         |   |  |  |    |               |    |               |    |               |    |               |     |              |                |
|--|--|-------------------------|---|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|--------------|----------------|
|  |  | 2.17.0<br>1.1.08        | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                |  | 12 | 8.415.264.920 | 12 | 4.829.381.500 | 12 | 5.013.644.460 | 12 | 5.207.120.568 | 36  | SEKRETA RIAT |                |
|  |  | 2.17.0<br>1.1.08<br>.01 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  | 12 | 4.722.300     | 12 | 4.722.300     | 12 | 4.722.300     | 12 | 4.722.300     | 36  | SEKRETA RIAT | Kota Samarinda |
|  |  | 2.17.0<br>1.1.08<br>.02 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | 36 | 876.699.000   | 36 | 1.139.400.000 | 36 | 1.139.400.000 | 36 | 1.139.400.000 | 108 | SEKRETA RIAT | Kota Samarinda |
|  |  | 2.17.0<br>1.1.08<br>.04 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |  | 12 | 7.533.843.620 | 12 | 3.685.259.200 | 12 | 3.869.522.160 | 12 | 4.062.998.268 | 36  | SEKRETA RIAT | Kota Samarinda |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|--|---|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |  |   | 2023  |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |  |   |                |
|        |         |                         |  |  |   | Target  | (Rp)          | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09        | <b>Kegiatan</b><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik  |   | 12  | 1.151.382.800 | 200    | 3.028.054.400 | 200    | 2.828.054.400 | 200    | 2.828.054.400 | 600  | SEKRETA RIAT                                      |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.01 | <b>Subkegiatan</b><br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |   | 25  | 455.153.000   | 8      | 40.000.000    | 8      | 40.000.000    | 8      | 40.000.000    | 24   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.02 | <b>Subkegiatan</b><br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |   | 0   | 0             | 16     | 437.340.400   | 16     | 437.340.400   | 16     | 437.340.400   | 48   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.06 | <b>Subkegiatan</b><br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |   | 0   | 0             | 105    | 238.960.000   | 105    | 188.960.000   | 105    | 188.960.000   | 315  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.07 | <b>Subkegiatan</b><br>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  |   | 0   | 0             | 160    | 171.500.000   | 103    | 171.500.000   | 103    | 171.500.000   | 366  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.08 | <b>Subkegiatan</b><br>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara   |   | 0   | 0             | 1      | 49.920.000    | 1      | 49.920.000    | 1      | 49.920.000    | 3  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.09 | <b>Subkegiatan</b><br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |   | 0   | 696.229.800   | 10     | 1.335.600.000 | 10     | 1.335.600.000 | 10     | 1.335.600.000 | 30   | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.10 | <b>Subkegiatan</b><br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |   | 20  | 0             | 3      | 661.438.000   | 3      | 511.438.000   | 3      | 511.438.000   | 9  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.12 | <b>Subkegiatan</b><br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah  | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi  |   | 0   | 0             | 1      | 93.296.000    | 1      | 93.296.000    | 1      | 93.296.000    | 3  | SEKRETA RIAT                                      | Kota Samarinda |
|        |         |                         |  |  |   |   |               |        |               |        |               |        |               |  |   |                |

| TUJUAN | SASARAN  | KODE            | PROGRAM DAN KEGIATAN  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |   |               |   |               |   |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi       |
|--------|--|-----------------|---|--|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|--|--------------|
|        |  |                 |   |  |   | 2023  |               | 2024                                    |               | 2025                                    |               | 2026                                    |               |   |  |              |
|        |  |                 |   |  |   | Target  | (Rp)          | Target                                  | (Rp)          | Target                                  | (Rp)          | Target                                  | (Rp)          |   |  |              |
| (1)    | (2)  | (3)             | (4)   | (5)  | (6)   | (7)   | (8)           | (9)                                     | (10)          | (11)                                    | (12)          | (13)                                    | (14)          | (15)  | (16)   | (17)         |
|        | Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB) |                 |   | Skor Kepuasan Masyarakat   | 95,44   | 95,5  |               | 95,6                                    |               | 95,7                                    |               | 96                                      |               | 96  |  |              |
|        |  | 3.30.06         | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)                                 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome) | 72,22   | 0   | 0             | 73                                      | 1.797.200.000 | 74                                      | 1.619.710.000 | 75                                      | 2.061.474.239 | 75  | UPTD.BPS MB                                  |              |
| -      | -  | -               | -   | mutu pelayanan BPSMB   | 85%   | 0   | -             | (A) 82 %                                |               | (A) 83 %                                |               | (A) 84 %                                |               | (A) 84 %  | UPTD.BPS MB                                  |              |
|        |  | 3.30.06.1.02    | Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | jumlah keluhan pelanggan   | 0,06  | 0   | 5.537.639.605 | ≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi) | 1.797.200.000 | ≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi) | 1.619.710.000 | ≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi) | 2.061.474.239 | ≤ 2% (Pengujian) dan ≤ 0,5% (kalibrasi)                     | UPTD.BPS MB                                  |              |
|        |  |                 |   | jumlah laporan mutu akreditasi   | 11  | 0   |               | 11                                      |               | 12                                      |               | 12                                      |               | 12  | UPTD.BPS MB                                  |              |
|        |  |                 |   | jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP                                     | 10  | 0   |               | 10                                      |               | 12                                      |               | 14                                      |               | 14  | UPTD.BPS MB                                  |              |
|        |  |                 |   | persentase capaian penerbitan sertifikat layanan                                 |   |   |               |   |               | 100                                     |               | 100                                     |               |   | UPTD.BPS MB                                  |              |
|        |  | 3.30.06.1.02.01 | Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk   | Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau  | 4   | 3   | 295.829.335   | 5                                       | 133.000.000   | 6                                       | 123.800.000   | 6                                       | 191.180.000   | 6   | UPTD.BPS MB                                  | 10 Kab/ Kota |
|        |  | 3.30.06.1.02.02 | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian   | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang                                       | 60  | 60  | 2.820.149.120 | 165                                     | 528.000.000   | 180                                     | 353.000.000   | 195                                     | 508.800.000   | 195   | UPTD.BPS MB                                  | 10 Kab/ Kota |
|        |  | 3.30.06.1.02.03 | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi   | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan  | 1   | 1   | 327.981.700   | 1                                       | 347.100.000   | 1                                       | 414.310.000   | 1                                       | 510.741.000   | 1   | UPTD.BPS MB                                  | 10 Kab/ Kota |
|        |  | 3.30.06.1.02.04 | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi   | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                                     | 2215  | 2215  | 2.093.679.450 | 2400                                    | 789.100.000   | 2600                                    | 728.600.000   | 2800                                    | 850.753.239   | 7.800   | UPTD.BPS MB                                  | 10 Kab/ Kota |
|        |  |                 |   |  |   |   |               |   |               |   |               |   |               |   |  |              |
|        |  | 3.30.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                       | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan  | 88  | 88  | 3.020.087.010 | 88,5                                    | 3.002.800.000 | 88,8                                    | 3.680.290.000 | 89                                      | 3.738.525.761 | 89  | UPTD.BPS MB                                  |              |
|        |  |                 |   | Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti                         | 100   | 100   | 90            | 80                                      |               | 90                                      | 90            | 100                                     |               | 100   |  |              |
|        |  | 3.30.01.1.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun                                  |   | 100   | 445.540.000   | 13                                      | 88.540.000    | 13                                      | 97.540.000    | 13                                      | 97.540.000    | 39  | UPTD.BPS MB                                  |              |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|---|---|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |   |   | 2023  |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             |  |   |                |
|        |         |                         |  |   |   | Target  | (Rp)        | Target | (Rp)        | Target | (Rp)        | Target | (Rp)        |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.02<br>.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |   | 26  | 445.540.000 | 13     | 88.540.000  | 13     | 97.540.000  | 13     | 97.540.000  | 39   | UPTD.BPS MB                                       | 10 Kab/Kota    |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.05        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi                        | 10  | 10  | 104.100.000 | 20     | 206.000.000 | 20     | 227.000.000 | 20     | 228.000.000 | 60   | UPTD.BPS MB                                       |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.05<br>.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |   | 0   |             | 1      | 26.000.000  | 1      | 27.000.000  | 1      | 28.000.000  | 3  | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.05<br>.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |   | 10  | 104.100.000 | 20     | 180.000.000 | 20     | 200.000.000 | 20     | 200.000.000 | 60   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.06        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   | 12  | 159.817.035 | 7      | 595.414.320 | 7      | 624.327.632 | 7      | 629.762.275 | 21   | UPTD.BPS MB                                       |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.06<br>.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |   | 10  | 10.003.900  | 10     | 12.000.000  | 10     | 12.000.000  | 10     | 12.000.000  | 30   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.06<br>.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |   | 7   | 61.092.735  | 4      | 43.500.000  | 4      | 61.000.000  | 4      | 65.000.000  | 12   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.06<br>.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |   | 24  | 40.200.000  | 24     | 57.000.000  | 24     | 58.200.000  | 24     | 59.400.000  | 72   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.06<br>.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |   | 11  | 46.581.200  | 11     | 46.581.200  | 11     | 46.581.200  | 11     | 46.581.200  | 33   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.06<br>.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |   | 12  | 1.939.200   | 12     | 2.133.120   | 12     | 2.346.432   | 12     | 2.581.075   | 36   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.06<br>.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   | 0   | 0           | 4      | 19.200.000  | 4      | 19.200.000  | 4      | 19.200.000  | 12   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.06<br>.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |   | 0   | 0           | 14     | 415.000.000 | 14     | 425.000.000 | 14     | 425.000.000 | 42   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         |                         |  |   |   |   |             |        |             |        |             |        |             |  |   |                |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)         | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|--|---|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |  |   | 2023  |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |  |   |                |
|        |         |                         |  |  |   | Target  | (Rp)          | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          | Target | (Rp)          |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.04        | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah                       |   | 0   | -             | 5      | 100.000.000   | 5      | 100.000.000   | 5      | 100.000.000   | 15   | UPTD.BPS MB                                       |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.04<br>.01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                |   | 0   | -             | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 36   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.04<br>.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                 | Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                               |   | 0   | -             | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 36   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.04<br>.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah |   | 0   | -             | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 36   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.04<br>.06 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                 | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah  |   | 0   | -             | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 36   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.04<br>.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |   | 0   | -             | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 12     | 20.000.000    | 36   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         |                         |  |  |   |   |               |        |               |        |               |        |               |  |   |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.07        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 53  | 23  | 139.500.295   | 10     | 70.000.000    | 11     | 580.000.000   | 10     | 500.000.000   | 31   | UPTD.BPS MB                                       |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.07<br>.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |   | 0   | -             | 0      | -             | 1      | 500.000.000   | 1      | 400.000.000   | 1  | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.07<br>.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |   | 23  | 139.500.295   | 10     | 70.000.000    | 10     | 80.000.000    | 10     | 100.000.000   | 30   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |
|        |         |                         |  |  |   |   |               |        |               |        |               |        |               |  |   |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.08        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            |   | 12  | 1.783.964.280 | 38     | 1.690.631.680 | 38     | 1.773.022.368 | 38     | 1.867.123.486 | 114  | UPTD.BPS MB                                       |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.08<br>.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   | 12  | 8.336.000     | 12     | 10.000.000    | 12     | 11.000.000    | 12     | 12.000.000    | 36   | UPTD.BPS MB                                       | Kota Samarinda |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |           |                      |            |                      |            |                      | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2022) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi         |
|--------|---------|-------------------------|---|--|---|---|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|--|----------------|
|        |         |                         |   |  |   | 2023  |                      | 2024      |                      | 2025       |                      | 2026       |                      |  |  |                |
|        |         |                         |   |  |   | Target  | (Rp)                 | Target    | (Rp)                 | Target     | (Rp)                 | Target     | (Rp)                 |  |  |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)   | (5)  | (6)   | (7)   | (8)                  | (9)       | (10)                 | (11)       | (12)                 | (13)       | (14)                 | (15)   | (16)   | (17)           |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.08<br>.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |   | 15  | 179.996.600          | 14        | 189.000.000          | 14         | 198.450.000          | 14         | 208.372.500          | 42   | UPTD.BPS MB                                  | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.08<br>.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |   | 12  | 1.595.631.680        | 12        | 1.491.631.680        | 12         | 1.563.572.368        | 12         | 1.646.750.986        | 36   | UPTD.BPS MB                                  | Kota Samarinda |
|        |         |                         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |   |   |                      |           |                      |            |                      |            |                      |  |  |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik  |   | 12  | 387.165.400          | 58        | 252.214.000          | 58         | 278.400.000          | 58         | 316.100.000          | 174  | UPTD.BPS MB                                  |                |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.09<br>.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |   | 4   | 79.633.300           | 4         | 75.000.000           | 4          | 82.500.000           | 4          | 90.750.000           | 12   | UPTD.BPS MB                                  | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.09<br>.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |   | 51  | 170.912.700          | 50        | 135.000.000          | 50         | 148.500.000          | 50         | 163.350.000          | 150  | UPTD.BPS MB                                  | Kota Samarinda |
|        |         | 3.30.0<br>1.1.09<br>.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |   | 4   | 136.619.400          | 4         | 42.214.000           | 4          | 47.400.000           | 4          | 62.000.000           | 12   | UPTD.BPS MB                                  | Kota Samarinda |
|        |         |                         | <b>TOTAL BPSMB</b>  |  |   |   | <b>8.557.726.615</b> |           | <b>4.800.000.000</b> |            | <b>5.300.000.000</b> |            | <b>5.800.000.000</b> |  |  |                |
|        |         |                         | <b>RANCANGAN PAGU BPSMB</b>   |  |   |   |                      |           | <b>4.800.000.000</b> |            | <b>5.300.000.000</b> |            | <b>5.800.000.000</b> |  |  |                |
|        |         |                         | <b>SELISIH</b>  |  |   |   |                      |           | -                    |            | -                    |            | 0                    |  |  |                |
|        |         | 2.17.0<br>5             | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian  | Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan   | 2,03%   | 300   | 1.639.670.000        | 2,34%     | 1.700.000.000        | 5,0%       | 1.850.000.000        | 8%         | 2.000.000.000        | 7,81%  | UPTD PELKOP                                  |                |
|        |         | 2.17.0<br>5.1.01        | Kegiatan Pendidikan dan Latihan   | Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan   | 570 orang                                       | 300   | 1.639.670.000        | 660 orang | 1.700.000.000        | 1400 orang | 1.850.000.000        | 2200 orang | 2.000.000.000        | 290 Koperasi   | UPTD PELKOP                                  |                |



| TUJUAN | SASARAN  | KODE            | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|--|-----------------|--|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---|----------------|
|        |  |                 |  |  |   | 2023  |               | 2024       |               | 2025       |               | 2026       |               |  |   |                |
|        |  |                 |  |  |   | Target  | (Rp)          | Target     | (Rp)          | Target     | (Rp)          | Target     | (Rp)          |  |   |                |
| (1)    | (2)  | (3)             | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)           | (9)        | (10)          | (11)       | (12)          | (13)       | (14)          | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |  |                 | Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi         | Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan  |   |   |               |            |               |            |               |            |               |  |   |                |
|        |  | 2.17.05.1.01.01 | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                         | 570 orang                                       | 240   | 1.639.670.000 | 660 orang  | 1.700.000.000 | 1400 orang | 1.850.000.000 | 2200 orang | 2.000.000.000 | 2200 orang   | UPTD PELKOP                                       | 10 kab/kota    |
|        | Sasaran 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi) |                 |  | Skor Kepuasan Masyarakat   | 0   | 85  |               | 86         |               | 87         |               | 88         |               | 88   |   |                |
|        |  | 2.17.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                    | 88  | 90  | 2.906.160.500 | 88,5       | 3.500.000.000 | 88,8       | 3.750.000.000 | 89         | 4.000.000.000 | 89   | UPTD PELKOP                                       |                |
|        |  |                 |  | Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti                   | 100   | 100   | 90            | 80         |               | 90         |               | 100        |               |  |   |                |
|        |  | 2.17.01.1.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun                            | 12 Dokumen                                      | 100   | 250.200.000   | 12 Dokumen | 90.000.000    | 12 Dokumen | 93.000.000    | 12 bulan   | 95.000.000    | 36   | UPTD PELKOP                                       |                |
|        |  | 2.17.01.1.02.01 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN         | 12 bulan  | 12  | 250.200.000   | 12 bulan   | 90.000.000    | 12 bulan   | 93.000.000    | 12 bulan   | 95.000.000    | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |  | 2.17.01.1.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi               | 12 orang  | 25  | 67.080.000    | 20 orang   | 145.000.000   | 20 orang   | 155.000.000   | 20 orang   | 165.000.000   | 12 bulan   | UPTD PELKOP                                       |                |
|        |  | 2.17.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                     |   | 0   | -             | 1          | 60.000.000    | 1          | 65.000.000    | 1          | 70.000.000    | 102  | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |             |        |             |        |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|---|---|---|---------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |   |   | 2023  |               | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             |  |   |                |
|        |         |                         |  |   |   | Target  | (Rp)          | Target | (Rp)        | Target | (Rp)        | Target | (Rp)        |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)   | (6)   | (7)   | (8)           | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.05<br>.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |   | 4   | 67.080.000    | 10     | 85.000.000  | 12     | 90.000.000  | 15     | 95.000.000  | 37   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 12 Dok  | 12  | 1.409.255.800 | 12 Dok | 492.000.000 | 12 Dok | 529.000.000 | 12 Dok | 563.200.000 | 36   | UPTD PELKOP                                       |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12  | 12  | 21.517.700    | 12     | 25.000.000  | 12     | 26.000.000  | 12     | 27.000.000  | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 bulan  | 0   |               | 70     | 70.000.000  | 75     | 75.000.000  | 80     | 80.000.000  | 225  | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |   | 0   |               | 12     | 30.000.000  | 12     | 35.000.000  | 12     | 40.000.000  | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 bulan  | 7   | 1.282.660.900 | 12     | 25.000.000  | 12     | 27.000.000  | 12     | 29.000.000  | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 bulan  | 4   | 103.138.000   | 12     | 40.000.000  | 12     | 43.900.000  | 12     | 45.000.000  | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 20 Laporan                                      | 0   |               | 25     | 200.000.000 | 30     | 210.000.000 | 35     | 220.000.000 | 90   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.06<br>.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 bulan  | 12  | 1.939.200     | 12     | 2.000.000   | 12     | 2.100.000   | 12     | 2.200.000   | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         |                         | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 12 bulan  | 0   |               | 24     | 100.000.000 | 24     | 110.000.000 | 24     | 120.000.000 | 72   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.04        | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah                        |   | 0   | -             | 5      | 100.000.000 | 5      | 100.000.000 | 5      | 100.000.000 | 15   | UPTD PELKOP                                       |                |

| TUJUAN | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |         |               |         |               |         |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|--------|---------|-------------------------|--|--|---|---|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---|----------------|
|        |         |                         |  |  |   | 2023  |             | 2024    |               | 2025    |               | 2026    |               |  |   |                |
|        |         |                         |  |  |   | Target  | (Rp)        | Target  | (Rp)          | Target  | (Rp)          | Target  | (Rp)          |  |   |                |
| (1)    | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)         | (9)     | (10)          | (11)    | (12)          | (13)    | (14)          | (15)   | (16)  | (17)           |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.04<br>.01 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                    |   | 0   | -           | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.04<br>.04 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                 | Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                   |   | 0   | -           | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.04<br>.05 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah     |   | 0   | -           | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.04<br>.06 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                 | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah  |   | 0   | -           | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.04<br>.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |   | 0   | -           | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 12      | 20.000.000    | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         |                         |  |  |   |   |             |         |               |         |               |         |               |  |   |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 12 bulan  | 25  | 319.318.400 | 12 unit | 400.000.000   | 12 unit | 452.000.000   | 12 unit | 505.000.000   | 36   | UPTD PELKOP                                       |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |   | 0   |             | 1       | 150.000.000   | 1       | 152.000.000   | 1       | 155.000.000   | 3  | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.07<br>.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 12 bulan  | 21  | 319.318.400 | 6       | 250.000.000   | 7       | 300.000.000   | 9       | 350.000.000   | 22   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.08        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                |   | 12  | 205.405.600 | 12 keg  | 1.470.000.000 | 12 keg  | 1.636.000.000 | 12 keg  | 1.602.000.000 | 36   | UPTD PELKOP                                       |                |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.08<br>.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 bulan  | 400   | 4.000.000   | 50      | 5.000.000     | 60      | 6.000.000     | 60      | 7.000.000     | 170  | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|        |         | 2.17.0<br>1.1.08<br>.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan  | 12  | 201.405.600 | 12      | 220.000.000   | 12      | 230.000.000   | 12      | 240.000.000   | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |

| TUJUAN                                      | SASARAN | KODE                    | PROGRAM DAN KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                      |          |                       |          |                       |          |                       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (15) | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (16) | Lokasi (17)    |
|---|---------|-------------------------|--|--|---|---|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--|---|----------------|
|   |         |                         |  |  |   | 2023  |                      | 2024     |                       | 2025     |                       | 2026     |                       |  |   |                |
|   |         |                         |  |  |   | Target  | (Rp)                 | Target   | (Rp)                  | Target   | (Rp)                  | Target   | (Rp)                  |  |   |                |
| (1)   | (2)     | (3)                     | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)                  | (9)      | (10)                  | (11)     | (12)                  | (13)     | (14)                  | (15)   | (16)  | (17)           |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.08<br>.04 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 bulan  | 0   | 0                    | 12       | 45.000.000            | 12       | 50.000.000            | 12       | 55.000.000            | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.08<br>.05 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |   | 0   | 0                    | 12       | 1.200.000.000         | 12       | 1.350.000.000         | 12       | 1.300.000.000         | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik  | 12 unit   | 12  | 654.900.700          | 18 unit  | 803.000.000           | 18 unit  | 785.000.000           | 18 unit  | 969.800.000           | 54   | UPTD PELKOP                                       |                |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 12 bulan  | 0   | 0                    | 1 Unit   | 15.000.000            | 1 Unit   | 17.000.000            | 1 Unit   | 19.000.000            | 3  | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 bulan  | 3   | 70.009.000           | 2 Unit   | 30.000.000            | 2 Unit   | 34.000.000            | 2 Unit   | 38.000.000            | 6  | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya  | 12 bulan  | 0   | 0                    | 15 Unit  | 25.000.000            | 15 Unit  | 27.000.000            | 15 Unit  | 30.000.000            | 45   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 12 bulan  | 80  | 75.158.000           | 12 Bulan | 33.000.000            | 12 Bulan | 37.000.000            | 12 Bulan | 38.000.000            | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 12 bulan  | 2   | 509.733.700          | 12 Bulan | 450.000.000           | 12 Bulan | 420.000.000           | 12 Bulan | 500.000.000           | 36   | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|   |         | 2.17.0<br>1.1.09<br>.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 12 bulan  | 0   |                      | 1 Paket  | 250.000.000           | 1 Paket  | 250.000.000           | 1 Paket  | 344.800.000           | 3  | UPTD PELKOP                                       | Kota Samarinda |
|   |         |                         |  | <b>TOTAL USULAN PAGU PELKOP</b>  |   |   | <b>4.545.830.500</b> |          | <b>5.200.000.000</b>  |          | <b>5.600.000.000</b>  |          | <b>6.000.000.000</b>  |  |   |                |
|   |         |                         |  | <b>TOTAL USULAN PAGU PELKOP</b>  |   |   |                      |          | <b>5.200.000.000</b>  |          | <b>5.600.000.000</b>  |          | <b>6.000.000.000</b>  |  |   |                |
| <b>Tota Rancangan Pagu I Dinas dan UPTD</b> |         |                         |  |  |   |   |                      |          | <b>64.000.000.000</b> |          | <b>95.900.000.000</b> |          | <b>97.800.000.000</b> |  |   |                |

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi dana realisasi anggaran, akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana capaian sasaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan hal itu, berikut ini disajikan indikator-indikator sasaran yang akan dicapai tahun 2024-2026, meliputi 18 Program yang selaras dengan RPD 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 20 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| INDIKATOR   | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022) | TAHUN 2024      | TAHUN 2025      | TAHUN 2026      | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| LPE Sektor Industri Pengolahan (%)  | 3,58  | 6               | 6               | 6               | 6   |
| Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%) | 6,84  | 10              | 10,43           | 11              | 11  |
| Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)                      | 4,76  | 5,20            | 5,56            | 5,92            | 5,92  |
| Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri                          | 5%  | 5%              | 0,1             | 0,15            | 15%   |
| Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas                                 | 17,04%  | 18,69%          | 0,1902          | 0,1958          | 19,58%  |
| Persentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)       | 18,83 %   | 20,00 %         | 22              | 25              | 25,00   |
| Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)                               | 534,53  | 566,60          | 600,601         | 636,636         | 636,64  |
| Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru                     | 64 jenis produk                                 | 67 jenis produk | 70 Jenis produk | 73 Jenis produk | 73 Jenis  |
| Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)                                    | 100   | 100             | 100             | 100             | 100   |
| persentase surat rekomendasi yang tepat waktu                                       | 100   | 100             | 100             | 100             | 100   |
| persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga                                 | 70%   | 80%             | 0,85            | 0,9             | 90  |

| INDIKATOR   | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022) | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH |
|---|---|------------|------------|------------|---|
| Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri                                     | 50%   | 75%        | 0,9        | 1          | 100%  |
| Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME ) | 76,09   | 77         | 79         | 80         | 80  |
| Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)  | 0   | 2          | 6          | 7          | 6   |
| Pertumbuhan Omzet UKM   | 5,60  | 5,80       | 6,3        | 6,8        | 6,8   |
| Pertumbuhan Omzet Koperasi  | 16%   | 19,00      | 21         | 23         | 23,0  |
| Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat  | 15,29%  | 31%        | 34,55%     | 35,53%     | 35,53%  |
| Persentase Koperasi Modern binaan provinsi  | 0   | 34%        | 0,66       | 1          | 100%  |
| Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital   | 0,91  | 5,00       | 10         | 15         | 15,00   |
| Jumlah UKM Potensial Ekspor   | 50  | 20 UKM     | 40 UKM     | 60 UKM     | 60 UKM  |
| Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)                        | 1,17  | 1,15       | 1,15       | 1,15       | 1   |
| Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)  | 18,47   | 16%        | 0,14       | 0,12       | 12%   |
| Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)  | 92,27   | 85%        | 0,9        | 0,92       | 92  |
| Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan  | 0   | 10         | 50         | 100        | 100   |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah   | 78,1  | 78,50      | 79,3       | 80,01      | 80,01   |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah  | 84,41   | 85,00      | 85,5       | 86         | 86,00   |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop  | 72,8  | 75,5       | 77,5       | 80         | 80  |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop   | 88,01   | 85,00      | 85,5       | 86         | 86,00   |
| Galeri UKM (%)  | 30  | 100        | 0          | 0          | 100   |
| Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan   | 88  | 88,5       | 88,8       | 89         | 89  |
| Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome)                      | 72,22   | 73         | 74         | 75         | 75  |
| mutu pelayanan BPSMB  | 85%   | (A) 82 %   | (A) 83 %   | (A) 84 %   | (A) 84 %  |
| Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan   | 88  | 88,5       | 88,8       | 89         | 89  |
| Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan  | 2,03%   | 2,34%      | 5,0%       | 8%         | 7,81%   |
| Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan   | 88  | 88,5       | 88,8       | 89         | 89  |

**TABEL 21 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA  
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)RPD TAHUN 2024 – 2026**

| No.       | Indikator Kinerja Kunci (IKK)   | Satuan | Kondisi Awal |               | Target |       |       | Kondisi Akhir |
|-----------|---|--------|--------------|---------------|--------|-------|-------|---------------|
|           |   |        | 2022         | 2023 (Target) | 2024   | 2025  | 2026  |               |
| -1        | -2  | -3     | -4           | -5            | -6     | -7    | -8    | -9            |
| <b>17</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>  |        |              |               |        |       |       |               |
| 1         | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas  | %      | 30,588       | 39            | 39     | 40    | 40    | 40            |
| 2         | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha   | %      | 77,382       | 75            | 75     | 75    | 75    | 75            |
| <b>30</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>   |        |              |               |        |       |       |               |
| 1         | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas  | %      | 55,71        | 55,73         | 55,75  | 55,77 | 55,80 | 55,80         |
| 2         | Persentase penanganan pengaduan konsumen  | %      | 100          | 100           | 100    | 100   | 100   | 100           |
| 3         | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku  | %      | 72,222       | 72            | 73     | 74    | 75    | 75            |
| 4         | Tertib Usaha  | %      | 100          | 100           | 100    | 100   | 100   | 100           |
| 5         | Persentase kinerja realisasi pupuk  | %      | 92,668       | 76            | 85     | 90    | 92    | 92            |
| 6         | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan  | %      | 76,09        | 75            | 77     | 79    | 80    | 80            |
| 7         | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok  | %      | 1,17         | 1,16          | 1,15   | 1,15  | 1,15  | 1,15          |
| <b>31</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>   |        |              |               |        |       |       |               |
| 1         | Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi   | %      | 20,702       | 18            | 17     | 16    | 15    | 15            |
| 2         | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | %      | 111,56       | 115           | 117    | 118   | 120   | 120           |
| 3         | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait    | %      | 23,611       | 24,5          | 25     | 25,5  | 26    | 26            |

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim Tahun 2024 sampai Tahun 2026 ini disusun untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2023

**Kepala Dinas,**

**Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197303141998032009



## Lampiran

Tabel 22. Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran

| TUJUAN/ SASARAN   | INDIKATOR  | CARA PERHITUNGAN  |
|---|--|---|
| <b>Tujuan 1</b><br>Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri    | <b>LPE Sektor Industri Pengolahan (%)</b>  | <b>Laju Pertumbuhan = [(Nilai Akhir - Nilai Awal) / Nilai Awal]x100</b>   |
| <b>Sasaran 1</b><br>Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan          | Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%)   | Kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dan non-batubara = (Nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas dan non-batubara / PDRB) * 100  |
| <b>Tujuan 2</b><br>Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan | <b>Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)</b> | <b>nilai ekspor nonmigas dan non batubara/ total ekspor * 100</b>   |
| <b>Sasaran 2</b><br>Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim   | Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)                                | Nilai ekspor pada tahun berjalan bersumber data BPS   |
| <b>sasaran 3</b><br>Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen       | Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)   | Indeks Keberdayaan Konsumen (Consumer Empowerment Index). Indeks Keberdayaan Konsumen adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana konsumen memiliki kekuatan, pengetahuan, dan sumber daya untuk membuat keputusan yang cerdas dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumsi mereka. di ukur oleh lembaga dari kementerian perdagangan / pihak ketiga |
| <b>TUJUAN 3 : Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.</b>          | <b>Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)</b>                            | <b>Pertumbuhan PDRB Sektor Koperasi dan UKM = [(Nilai PDRB Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sekarang - Nilai PDRB Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sebelumnya) / Nilai PDRB Sektor Koperasi dan UKM Tahun Sebelumnya] * 100</b>   |
|   | <b>Inflasi pangan bergejolak (%)</b>   | <b>inflasi volatil food sumber data dari BPS</b>  |

| TUJUAN/ SASARAN   | INDIKATOR  | CARA PERHITUNGAN  |
|---|--|---|
| <b>Sasaran 4 :<br/>Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM</b>                                     | Pertumbuhan Omzet UKM  | Pertumbuhan omzet = [(nilai omzet tahun akhir- nilai omzet awal)/ Nilai omzet] x 100  |
|   | Pertumbuhan Omzet Koperasi   | Pertumbuhan omzet = [(nilai omzet tahun akhir- nilai omzet awal)/ Nilai omzet] x 100  |
| <b>Sasaran5 :<br/>Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan</b>                                       | Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%) | $KVpt = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} Sn}{P}$   |
| <b>Tujuan 4: Mewujudkan birokrasipemerintahan yang akuntabel danmemiliki pelayanan publik berkualitas</b>       | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                                  | SAKIP melibatkan berbagai aspek dan faktor yang relevan, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Tujuan utama dari SAKIP adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah kepada publik.   |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja suatu instansi atau pelayanan yang diberikan dengan :<br><br>1. survei yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dinilai.<br>2. Pengumpulan Data<br>3. skoring dan analisis data |
| <b>Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop</b>                           | Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop                                     | Perhitungan dilakukan oleh APIP / Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur   |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop                                      | Melakukan survey dengan mitra Sektor Indagkop   |
|   | Galeri UKM (%)   | perhitungan fisik dari pembangunan Gedung Galeri yang sampai dengan tahun 2022 sebesar 30%  |
| <b>Sasaran 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB)</b>                             | Skor Kepuasan Masyarakat   | perhitungan dari survey yang dilakukan oleh UPTD dalam triwulan maupun tahunan  |
| <b>Sasaran 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi)</b> | Skor Kepuasan Masyarakat   | perhitungan dari survey yang dilakukan oleh UPTD dalam triwulan maupun tahunan  |

Tabel 23. Formula Perhitungan Program Indikator

| Nama Program   | Indikator   | Cara Perhitungan  |
|--|---|---|
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri           | Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara (%)  | = [(PDRB tahun ini - PDRB tahun sebelumnya) / PDRB tahun sebelumnya] * 100  |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri               | Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri      | = jumlah ijin yg dikendalikan / jumlah keseluruhan ijin x 100   |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas             | rumus perhitungan : jumlah industri tahun N di SIINas / jumlah industri total terdata SIINAS sampai dengan tahun N x 100 % . Tahun 2022 : 60 / 352 x 100 % = 17,04. Tahun 2023 : 80 / 432 x 100 % = 18,51. Tahun 2024 : 100 / 532 x 100 % = 18,69. Tahun 2025 : 125 / 657 x 100 % = 19,02. Tahun 2026 = 160 / 817 x 100 % = 19,58 |
| Program Pengembangan Ekspor                            | Produk Daerah yg masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru | jumlah produk baru dan atau jumlah negara tujuan baru   |
| Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan               | Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu (IKK)                | = Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1x24 jam) / Jumlah Permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar  |
|  | persentase surat rekomendasi yang tepat waktu                   | = jumlah perijinan / jumlah permohonan perijinan x 100%   |
|  | persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga             | jumlah pelaku yang taat peraturan dibagi total pelaku yang dilakukan pengawasan dikali 100%   |

| Nama Program  | Indikator  | Cara Perhitungan   |
|---|--|--|
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting (%)   | <p>Disparitas Harga = [(Harga Barang komoditi di pasar induk - Harga rata-rata Barang kab/kota) / Harga Barang pasar induk] * 100</p> <p>Dalam rumus di atas, Harga Barang Pokok mengacu pada harga rata-rata atau harga tertentu dari barang pokok yang diamati. Harga Barang Penting adalah harga rata-rata atau harga tertentu dari barang penting yang menjadi perbandingan.</p> |
|   | Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK OUTCOME)   | = Realisasi Penyaluran pupuk / RDKK(rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani)   |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan                                       | awal tahun 2024 berupa kajian, tahun 2025 - 2026 lembaga food station<br>awal tahun 2024 kajian sebesar 10 %   |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                | Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri                                    | <p>= jumlah produk UMKM binaan yang masuk pasar dibagi jumlah total produk UMKM yang dibina X 100%</p> <p>Produk Daerah yg masuk pasar dalam negeri tahun 2023 = 60%, Tahun 2024 = 75%, tahun 2025 = 90%, tahun 2026 = 100%</p> <p>istimasi Produk UMKM yang didamping pertahun 15 jenis produk diakhir tahun ada 39 Jenis Produk UMKM</p>   |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                      | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (IKK OUTCOME) | = Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan / Jumlah barang beredar yang diawasi   |


| Nama Program   | Indikator  | Cara Perhitungan  |
|--|--|---|
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                              | Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat                                   | jumlah koperasi yang masuk katagori sehat adalah koperasi yang telah melaksanakan RAT (rapat anggota Tahunan<br>rumus = jumlah koperasi provinsi yang RAT dibagi Jumlah Koperasi diawasi dan menindaklanjuti X 100% |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Persentase Koperasi Modern binaan provinsi                                       | = jumlah koperasi modern provinsi dibagi total koperasi provinsi yang didamping nuju kop modern X 100%  |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital  | = jumlah UKM Digital / jumlah UKM yang ada x 100%   |
| Program Pengembangan UMKM  | Jumlah UKM Potensial Ekspor  | Jumlah UKM Potensial Ekspor   |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                    | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan  |   |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD.BPSMB)              | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK outcome) | = Jumlah sampel yang sesuai ketentuan / Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun   |
| -  | mutu pelayanan BPSMB   |   |
| Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                             | Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan                             | =jumlah Anggota kop prov dan UKM yg ikut pelatihan dibagi anggota koperasi aktif dan UKM x 100%   |

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
NIP. 19690512 198903 2 009